

IKHTIAR MENJADI GURU PROFESIONAL DAN BERKARAKTER
(Studi Kritis Terhadap Sertifikasi Guru dan Kecurangan dalam Ujian Nasional)



TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Magister Pendidikan Agama Islam (M.Pd.I) pada Program Pascasarjana
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

Oleh

TALMIADI

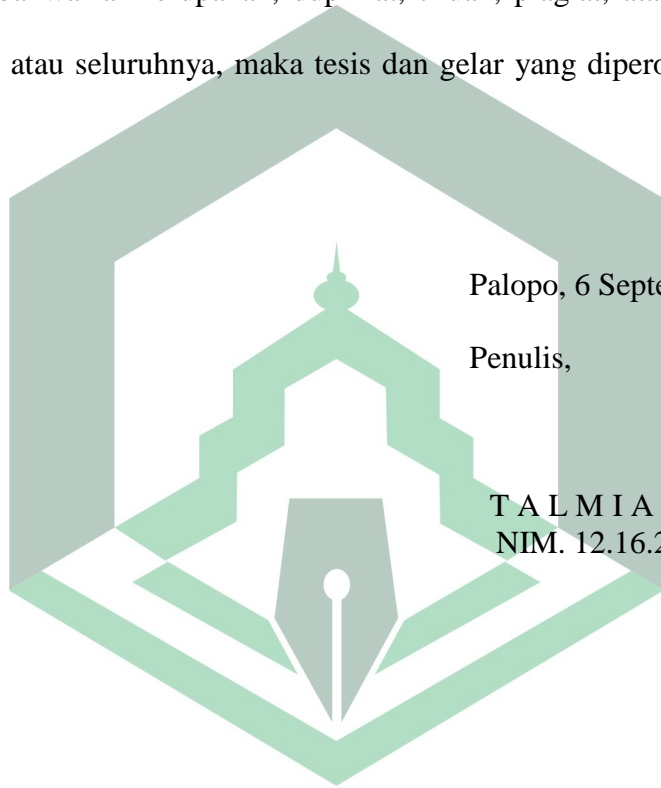
NIM. 12.16.2.01.002

IAIN PALOPO

PROGRAM PASCASARJANA
STAIN PALOPO
2014

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan, duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Palopo, 6 September 2014

Penulis,

TALMIADI
NIM. 12.16.2.01.002

IAIN PALOPO

PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Promotor penulisan tesis Saudara Talmiadi, NIM. 12.16.2.01.002, mahasiswa program Pascasarjana STAIN Palopo, konsentrasi Pendidikan Agama Islam (PAI), setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi tesis yang berjudul *“Ikhtiar Menjadi Guru Profesional dan Berkarakter (Studi Kritis Terhadap Sertifikasi Guru dan Kecurangan dalam Ujian Nasional)”* memandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk menempuh Ujian Promosi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Palopo, 9 September 2014

Dewan Penguji:

1. Dr. K.H. Syarifuddin Daud, M.A. (.....)
2. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. (.....)
3. Prof. Dr.H.M. Said Mahmud, Lc., M.A. (.....)
4. Dr. Muhaemin, M.A. (.....)

Pembimbing:

1. Prof. Dr.H.M. Said Mahmud Lc., M.A. (.....)
2. Dr. Muhaemin, M.A. (.....)

Ketua STAIN Palopo

Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
NIP.19691104 199403 1 004

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
STAIN Palopo

Dr. Abbas Langaji, M. Ag.
NIP.197405202000031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد

وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Ikhtiar Menjadi Guru Profesional dan Berkarakter (Studi Kritis Terhadap Sertifikasi Guru dan Kecurangan dalam Ujian Nasional)”, untuk diajukan guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana STAIN Palopo. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. Rasul akhir zaman sebagai panutan umat manusia.

Sebagai insan yang lemah, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama mengikuti Program Pascasarjana STAIN Palopo hingga selesai tesis ini telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang sungguh tidak bisa dilupakan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ketua STAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol, M.Ag. dan para Wakil Ketua STAIN Palopo yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana.

2. Direktur Program Pascasarjana Dr. Abbas Langaji, M.Ag. bersama seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dengan fasilitas dan kemudahan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana program studi Pendidikan Agama Islam.

3. Pembimbing I dan II, Prof. Dr. H.M. Said Mahmud, Lc., M.A. dan Dr. Muhaemin, M.A., yang secara langsung memberikan bimbingan, arahan, dan saran-saran yang berharga kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai.

4. Penguji I dan II, Dr. K.H. Syarifuddin Daud, M.A. dan Dr. Abdul Pirol, M.Ag., yang telah memberikan koreksi dan arahan yang berharga demi perbaikan tesis ini.

5. Kedua orang tua tercinta, Muhammad (*Almarhum*) dan Nursahnim yang telah membesarkan, mengasuh, membimbing, serta mendo'akan kesuksesan penulis sehingga bisa menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana STAIN Palopo.

6. Mertua tercinta, Drs. H. Lukmanul Hakim dan Hj. Fatimah Dg. Caya (*Almarhumah*), yang telah banyak memberikan nasehat dan mendo'akan penulis sehingga bisa menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana STAIN Palopo.

7. Istri tercinta, Dewi Wahyuni Lukman, S. Ip. yang selalu setia mendampingi penulis dalam suka dan duka begitu pula selalu memberikan motivasi dan dukungan moril dan materil di tengah kesibukannya menyelesaikan pendidikannya pada program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Kepada semua permata hatiku, Ahmad Rifqi Ridwanullah T., Ahmad Dzulfahmi Fadhlullah T., Afifah Nurul 'Izzah

Talmiadi dan Afiqah Nurfadilah Talmiadi, yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan studi pascasarjana.

8. Kepada kakandaku Sahraf, Sa'idah, dan Rafi'ah, yang banyak membantu dan memberikan dukungan moril maupun materil, serta doa yang terus mengalir. Kepada ikhwan/akhawat di Yayasan Nurul Islam dan Insan Madani, yang telah banyak memberikan dukungan moril dan materil, dalam proses penyelesaian studi Pascasarjana di STAIN Palopo.

9. Kepada guru-guruku di Ma'had Jamaluddin As-Sunnah Lombok Timur NTB, khususnya TGH. Husni Abdul Mannan, Lc., M.A. (*Allahu yarhamhu*) dan TGH. Ahmad Manar, Lc., yang telah membimbing penulis selama menimba ilmu di sana (1991-1994).

10. Masih banyak lagi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, semuanya itu penulis tidak dapat membalasnya kecuali permohonan rahmat dan kasih sayang serta balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyusun tesis masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penulisan dan alur pikir, analisa pemahaman, maupun penarikan kesimpulan dan lain-lain.

Oleh karena itu, dengan hati terbuka dan ikhlas penulis menerima berbagai kritikan yang konstruktif dari semua pihak, demi peningkatan mutu penulis di masa mendatang.

Akhirnya, hanya kepada Allah berserah diri, semoga tesis ini, bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Amin..

Palopo, 9 September 2014

P e n u l i s

T A L M I A D I
NIM. 12.16.2.01.002



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	20
E. Kerangka Pikir	24
F. Metode Penelitian	26
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	29
H. Garis Besar Isi Tesis	30
BAB II POTRET GURU SERTIFIKASI	32
A. Realitas Guru dalam Sertifikasi	32
B. Kompetensi Guru dalam Pendidikan	38
C. Konsekuensi Sertifikasi Guru	54
BAB III PROFESIONALISME GURU DALAM MENGHADAPI UJIAN NASIONAL	59
A. Sikap Guru dalam Menghadapi Ujian Nasional	59
B. Kecurangan Sistemik dalam Ujian Nasional	65
C. Tawaran Solutif Terhadap Permasalahan Ujian Nasional	74
BAB IV INTEGRASI PROFESIONALITAS DAN KARAKTER DALAM PENDIDIKAN	77
A. Korelasi Antara Profesionalitas dan Karakter Guru	77
B. Urgensi Keteladanan dalam Pendidikan	85
C. Upaya Meningkatkan Profesionalitas dan Karakter Guru	95
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Implikasi	100

DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	107
RIWAYAT HIDUP	124




IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun dengan sejumlah praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata snadang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf  (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini, *al* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, mahasiswa yang menulis karya tulis ilmiah diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	Z	zet
س	šin	š	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fatha dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fatha dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fatha dan alif atau yā'</i>	a	a dan garis di atas
اِي	<i>kasra dan yā'</i>	i	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'* *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

رَبَّنَا	: <i>rabbnā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمْ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُو	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

عَلِيٌّ	: <i>‘Alī</i> (bukan <i>‘Aliyy</i> atau <i>‘Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>‘Arabī</i> (bukan <i>‘Arabiyy</i> atau <i>‘Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

السَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (<i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْثَنَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *al-Qur'ān* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibrah bi 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḏān al-laḏī unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīẓ min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s	= ‘alaihi al-salām
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
Qs.../...:4	= Qs al-Baqarah/2:4 atau Qs Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
MTs	= Madrasah Tsanawiyah
MA	= Madrasah Aliyah
IMTAQ	= Iman dan Taqwa
IPTEK	= Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Kemenag	= Kementerian Agama
Dikbud	= Pendidikan dan Kebudayaan

PKG	= Penilaian Kinerja Guru
PLPG	= Pendidikan dan Latihan Profesi Guru
PPG	= Pendidikan Profesi Guru
UU	= Undang-undang
SISDIKNAS	= Sistem Pendidikan Nasional
KTSP	= Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
SMP	= Sekolah Menengah Pertama
SMA	= Sekolah Menengah Atas
SMK	= Sekolah Menengah Kejuruan



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Nama : Talmiadi
Nim : 12.16.2.01.002
Judul Tesis : IKHTIAR MENJADI GURU PROFESIONAL DAN BERKARAKTER
(Studi Kritis Terhadap Sertifikasi Guru dan Kecurangan dalam Ujian Nasional)

Tesis ini, bertujuan untuk mengetahui ikhtiar peningkatan profesionalitas dan karakter guru, yang selama ini telah dinodai oleh perilaku kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional. Selanjutnya tujuan utama tersebut dapat diperinci ke dalam beberapa tujuan spesifik, yaitu: a). Untuk mendeskripsikan potret guru dalam sertifikasi dari berbagai perspektif; b). Untuk mendeskripsikan realitas guru dalam menghadapi Ujian Nasional dan perilaku kecurangan di dalamnya yang telah merusak citra guru dan karakter peserta didik secara khusus, dan citra dunia pendidikan secara umum; dan c). Untuk merumuskan upaya mengintegrasikan profesionalitas dan karakter guru dalam pendidikan, sebagai ikhtiar dalam memulihkan citra guru dan dunia pendidikan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui riset berbagai buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Literatur yang diteliti meliputi buku yang berkaitan dengan sertifikasi dan kompetensi guru dan buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan karakter dan Ujian Nasional. Dari literatur tersebut dapat ditemukan berbagai pendapat yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan penelitian. Selanjutnya data yang telah diperoleh dari suatu sumber, diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Penarikan kesimpulan dilakukan dengan kesimpulan yang bersifat induktif, deduktif, atau komparatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program sertifikasi guru belum mampu menggaransi profesionalitas guru secara utuh dan kontinu, hal ini ditandai dengan perilaku kecurangan dalam setiap pelaksanaan Ujian Nasional. Selanjutnya, perilaku kecurangan ini telah berimplikasi terhadap citra guru dan mentalitas peserta didik yang akan ditumbuhkembangkan karakternya. Dalam konteks inilah dibutuhkan integrasi profesionalisme dan karakter guru melalui keteladanan, agar mampu menjadi model yang akan ditiru oleh peserta didik dalam proses pembelajaran.

Melalui penelitian ini diharapkan agar setiap guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi, tidak stagnan dan berada pada zona nyaman (*comfort zone*) dengan predikat profesionalnya, tetapi lebih pro-aktif dalam melanjutkan dan meningkatkan kualitas kinerjanya, melalui pendidikan yang lebih tinggi dan pelatihan yang intensif di setiap kesempatan, dan juga pemerintah melalui instansi terkait mengoptimalkan sistem Penilaian Kinerja Guru (PKG) secara berkala, sehingga para guru memiliki tanggung jawab moral dalam meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional yang telah mencederai prinsip-prinsip profesionalitas dalam dunia pendidikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu komponen penentu kualitas pendidikan adalah tenaga pendidik atau guru yang menjadi pioner dalam pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM) di sekolah. Posisi dan peran strategis guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara otomatis melahirkan tuntutan profesionalitas bagi kaum guru. Karena, merekalah pemeran utama dalam mengajar dan membimbing peserta didik, sehingga kompetensi dan kapabilitas mutlak harus dimiliki.

Rendahnya kualitas *output* institusi pendidikan di Indonesia yang dirilis dari berbagai hasil lembaga penelitian, baik nasional maupun internasional, mengindikasikan rendahnya mutu guru selaku tenaga pengajar, sehingga kritik dan sorotan tajam diarahkan kepada profesi keguruan yang minim profesionalitas. Padahal, tenaga pengajar bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kualitas pendidikan.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Universitas Paramadina Jakarta, yang dipublikasikan oleh majalah *Mosaik*, edisi Mei 2004. Hasilnya cukup membuat terhenyak, bahwa kualitas pendidikan di Indonesia menduduki peringkat keempat dari bawah (peringkat 102 dari 106 negara).¹

¹ Munif Chatib, *Gurunya Manusia: Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara*, (Cet. XII; Bandung: Kaifa, 2013), h. 22.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), sebagai lembaga penelitian internasional dengan program unggulan mereka, *Programme for International Student Assessment* (PISA). Pada tahun 2006-2007, lembaga tersebut telah merilis urutan kualitas negara-negara di dunia dan menempatkan kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan kedua paling rendah.²

Kondisi inilah yang direspons oleh pemerintah dengan mengesahkan Undang-Undang Guru dan Dosen sebagai payung hukum dalam memberlakukan program sertifikasi, guna meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan guru dan dosen.

Berbicara profesionalitas guru di Indonesia memang masih belum memadai, jika dibandingkan dengan negara-negara maju di Barat dan Eropa serta negara-negara yang sedang berkembang di kawasan Asia. Potret guru di Indonesia saat ini masih membutuhkan perhatian yang serius, baik dari aspek kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi paedagogik, maupun kompetensi sosial.

Secara profesi, guru dituntut untuk mengembangkan profesionalitas diri, sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mendidik, mengajar dan melatih anak didik.³ Di sinilah letak tuntutan adaptasi guru sebagai pengajar

² *Ibid.*

³ Nuni Yusvavera Syatra, *Desain Relasi Efektif Guru dan Murid*, (Cet. I; Jogjakarta: Buku Biru, 2013), h. 53.

sekaligus pendidik, terhadap perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan sains, teknologi, dan informasi yang akseleratif.

Di samping itu, aspek lain yang harus dimiliki oleh guru adalah karakter. Sebab, selama ini, wacana pendidikan karakter terkesan berorientasi kepada peserta didik semata, dengan argumentasi faktual dewasa ini, tingginya frekuensi tawuran pelajar, seks bebas dan penyalahgunaan obat-obat terlarang serta tindakan-tindakan kriminal lainnya di kalangan pelajar. Padahal, mereka adalah korban sistemik dari pendidikan yang krisis nilai keteladanan.

Profesi guru adalah profesi yang berbeda dengan yang lainnya. Karena identitas sebagai seorang guru atau pendidik senantiasa melekat, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sehingga, seluruh aspek kehidupan seorang guru menjadi sorotan dari berbagai perspektif.

Oleh sebab itu, untuk menjaga reputasi dan integritasnya seorang guru harus mawas diri dan menjaga sikap dan prilakunya, agar layak digugu dan ditiru. Akhir-akhir ini, banyak fakta yang menunjukkan pudarnya karakter guru, seperti melakukan plagiaris karya ilmiah sebagai syarat sertifikasi jalur portofolio dan keterlibatan guru dalam kecurangan pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

Gejala *split personality* (kepribadian yang pecah) telah menghinggap kehidupan guru sebagai dampak dari sekularisasi ilmu pengetahuan dan rendahnya pemahaman tentang epistemologi. Akibatnya, karakter seakan-akan hanya menjadi milik guru-guru tertentu yang secara disiplin ilmu berkorelasi dan relevan. Misalnya, karakter bagi Guru Agama, Guru Bimbingan Konseling (BK) dan Guru Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn), di luar disiplin ilmu ini seolah-olah tidak terbebani dengan karakter.

Dalam dunia pendidikan, persoalan karakter bukan suatu hal yang tersegmentasi, tetapi bersifat universal. Kepemilikan karakter bukan hanya wajib bagi siswa (peserta didik), tetapi para gurupun wajib memilikinya terlebih dahulu agar dapat diteladani oleh para siswa. Sehingga, tidak terjadi suatu kondisi seperti yang populer dalam sebuah pameo, “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Substansi dari ungkapan ini adalah keteladanan dari para guru bagi peserta didik.

Keteladanan adalah bagian dari karakter, karakter mudah dibicarakan, oleh siapapun. Namun mendidik perilaku baik menjadi karakter, bukan perkara mudah. Guru yang tidak mafhum mengapa menjadi guru, jangan harap bisa mendidik karakter.⁴ Jadi, untuk menghadirkan pendidikan karakter bagi peserta didik harus dimulai dari tenaga pendidik yakni guru.

Dewasa ini, dunia pendidikan di Indonesia sedang mengalami proses reorientasi seiring dengan bergulirnya reformasi pemerintahan, hal ini ditandai dengan penetapan regulasi atau kebijakan pendidikan di berbagai aspek, seperti penyempurnaan kurikulum, penetapan anggaran pendidikan dengan persentase 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), perbaikan kesejahteraan guru melalui program sertifikasi, dan peningkatan kualitas keilmuan guru melalui

⁴ Erie Sudewo, *Best Practice Character Building, Menuju Indonesia Lebih Baik*, (Cet. II; Jakarta: Republika, 2011), h. 246.

stratifikasi pendidikan akademik dengan standar kualifikasi minimal strata satu atau bergelar sarjana S1.

Seluruh proses pembenahan ranah pendidikan tersebut bermuara pada satu tujuan utama, yakni untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional yang merupakan implementasi dari tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang.

Akan tetapi, aspek vital yang harus diutamakan dalam proses perbaikan sistem pendidikan ini adalah kualitas guru selaku pengajar dan pendidik, tanpa mengesampingkan aspek yang lainnya. Karena sejarah dunia telah mencatat, bagaimana bangsa-bangsa Eropa mampu menguasai sains dan teknologi disebabkan kemajuan yang mereka raih dalam bidang pendidikan, demikian pula halnya dengan bangsa Jepang mampu menguasai industri otomotif dunia dengan mengalahkan bangsa-bangsa Eropa, dikarenakan pendidikan yang ditopang oleh kualitas guru yang memadai.

Dengan demikian, dalam konteks Indonesia, profesionalitas dan karakter guru menjadi salah satu kunci peningkatan kualitas pendidikan dan perbaikan karakter generasi bangsa. Hal ini telah direalisasikan dalam bentuk program sertifikasi guru yang menjadi amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Namun, program tersebut harus dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan oleh insatnsi terkait, agar hasilnya terukur dari waktu ke waktu.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Diskursus tentang pendidikan karakter semakin mewarnai khazanah dunia pendidikan di Indonesia, yang disebabkan oleh rendahnya kualitas moral atau etika *output* institusi-institusi pendidikan yang ada di berbagai level, dan dipandang sebagai indikator kegagalan dunia pendidikan dalam mendidik generasi bangsa.

Padahal sesungguhnya, peserta didik yang menjadi *raw-input* dalam sebuah institusi pendidikan merupakan ‘bahan mentah’ yang akan diolah melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Jika prosesnya baik dan tenaga yang menanganinya profesional, tentu saja hasil akhirnya akan baik pula. Olehnya itu, kondisi terpuruknya moralitas generasi bangsa dewasa ini tidak boleh divonis sebagai kesalahan mereka sendiri, karena secara sistemik masih memiliki korelasi dengan komponen pendidikan yang lain, yakni guru sebagai tenaga pengajar sekaligus pendidik.

Dengan bahasa lain, tuntutan berkarakter tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada peserta didik, tetapi karakter itu harus juga dimiliki oleh guru yang menjadi patron bagi anak didik mereka, di samping modal kompetensi dan profesionalitas.

Sebagai upaya merespon kondisi tersebut, muncullah gagasan dari pemerintah untuk merevitalisasi pendidikan karakter dan upaya peningkatan profesionalisme guru dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Selanjutnya, implementasi dari Undang-Undang RI. Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dilaksanakanlah proses sertifikasi guru dan dosen guna meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan mereka. Akan tetapi, dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang tinggi, tidak cukup hanya dengan bermodalkan profesionalitas, namun harus disertai dengan kepemilikan karakter bagi seorang guru, karena ia akan menjadi teladan bagi peserta didik yang dibimbingnya.

Kedua ranah inilah yang akan menjadi fokus kajian penulis, yakni aspek profesionalitas dan karakter guru yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pendidikan, yang saat ini telah dinodai oleh kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dari tahun ke tahun. Kecurangan yang melibatkan guru dalam pelaksanaan Ujian Nasional merupakan cermin dari kegagalan pendidikan karakter, dan hal ini harus direspons oleh seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pendidikan.

2. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah yang telah dideskripsikan, penulis mengemukakan pertanyaan-pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana potret guru dalam sertifikasi?
2. Bagaimana realitas guru dalam menghadapi ujian nasional?
3. Bagaimana mengintegrasikan profesionalisme dan karakter guru dalam pendidikan?

C. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

Kata guru berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.⁵ Pengertian ini mengacu pada tugas guru di institusi-institusi pendidikan formal, baik tingkat dasar, tingkat menengah maupun tingkat atas.

Roestiyah N.K. yang mengutip pendapat seorang ahli pendidikan seperti yang dikutip oleh Imam Wahyudi, "*Teacher is a person to know or be able to do something or gives a person knowledge or skill*" (Guru adalah seorang yang menyebabkan orang lain mengetahui atau mampu melaksanakan sesuatu atau mempunyai keterampilan).⁶

Menurut Moh. Uzer Usman mengemukakan bahwa guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru.⁷ Pengertian ini menegaskan bahwa tidak semua orang bisa menjadi guru, kecuali orang-orang yang

⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Guru>, *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, diakses di Palopo tanggal 30 Desember 2013.

⁶ Imam Wahyudi, *Mengejar Profesionalisme Guru, Strategi Praktis Mewujudkan Citra Guru Profesional*, (Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 15.

⁷ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991). h. 14.

telah memiliki kompetensi keilmuan yang memadai, kepribadian yang unggul sebagai teladan bagi para peserta didik mereka.

Sedangkan dalam pandangan Muhaimin, guru dalam perspektif pendidikan Islam disebut *ustadz*, kata ini biasa digunakan untuk memanggil seorang profesor. Ini mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk memiliki komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya.⁸ Pandangan ini semakin menegaskan tanggung jawab intelektual seorang guru dalam menjalankan tugasnya secara profesional.

Profesional berasal dari bahasa Latin, *professio*, yang berarti pekerjaan, keahlian, jabatan, jabatan guru besar. Dalam pengertian yang lebih lengkap berarti seseorang yang melibatkan diri dalam salah satu keahlian yang harus dipelajari dengan khusus.⁹

Selanjutnya kata profesi masuk ke dalam kosa kata bahasa Indonesia melalui bahasa Inggris (*Profession*) atau bahasa Belanda (*Professie*). Kedua bahasa Barat ini menerima kata ini dari Bahasa Latin, *professio*, yang arti harfiahnya berarti pengakuan atau pernyataan. Kata kerja untuk tidak mengaku atau tidak menyatakan ialah *profiteri*. Apa yang telah dinyatakan atau diakui disebut *professus*.¹⁰

⁸ Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*, (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 173.

⁹ Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 205.

¹⁰ Mochtar Buchori, *Pendidikan dalam Pembangunan*, (Cet. I; IKIP Muhammadiyah Press, 1994), h. 36.

Dari kata profesional ini lalu muncullah istilah profesionalisme, yaitu sikap kerja dan budaya berlandaskan idealisme dan etika untuk mencintai, menghayati, meningkatkan serta mengembangkan keahlian yang dimiliki agar bisa memberikan hasil yang terbaik.¹¹

Menurut Abuddin Nata, profesionalisme dapat diartikan sebagai pandangan yang menganggap bidang pekerjaan sebagai suatu dedikasi melalui keahlian tertentu dan yang memandang keahlian itu sebagai sesuatu yang harus diperbaharui secara berkesinambungan dengan memanfaatkan perkembangan yang ada dalam ilmu pengetahuan.¹²

Dalam kaitannya dengan pendidikan, para ahli pendidikan pada umumnya memasukkan guru sebagai pekerja profesional, yaitu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.¹³ Fenomena seperti yang tersebut pada kalimat terakhir dari pengertian di atas, lazim terjadi di Indonesia terutama sebelum era reformasi dan program sertifikasi guru, banyak sarjana yang non-keguruan memilih menjadi guru dengan modal ijazah akta IV, karena tidak ada pekerjaan lain. Namun saat ini, ijazah akta IV sudah tidak

¹¹ Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Cet. I; Jkarta: Bumi Aksara, 2005), h. 272.

¹² H. Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 140.

¹³ Moh. Uzer Usman, *loc. cit.*

berlaku lagi dengan adanya pendidikan profesi guru (PPG), hal ini bertujuan untuk merekrut tenaga guru yang profesional.

Sedangkan terminologi karakter yang sering disamakan dengan istilah “temperamen” ,”tabiat”, “watak” atau “akhlak” yang memberinya sebuah definisi sesuatu yang menekankan unsur psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. Secara harfiah menurut beberapa bahasa, karakter memiliki berbagai arti seperti : “kharacter” (Latin) berarti *instrument of marking*, “charessein” (Prancis) berarti *to engrove* (mengukir), “watek” (Jawa) berarti ciri wanci; “watak” (Indonesia) berarti sifat pembawaan yang mempengaruhi tingkah laku, budi pekerti, tabiat, dan peringai.¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “karakter” berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain: tabiat, watak.¹⁵

Menurut Ditjen Mandikdasmen - Kementerian Pendidikan Nasional:

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat.¹⁶

¹⁴<http://sintyaapriliani284.blogspot.com/2013/06/pengertian-karakter-menurut-ahli.html> Diakses pada tanggal 30 Desember 2013.

¹⁵ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 389.

¹⁶ Irfan Dani, *Pengertian Karakter*, dalam pustaka.pandani.web.id/2013/03/pengertian-karakter.html, diakses tanggal 31 Desember 2013.

Selanjutnya, Ki Hadjar Dewantara (1889-1959 M.), memandang karakter itu sebagai watak atau budi pekerti. Menurut Ki Hadjar Dewantara, budi pekerti adalah bersatunya antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan, yang kemudian menimbulkan tenaga.¹⁷ Dalam pandangan ini, sikap dan perilaku manusia yang menjelma menjadi kenyataan merupakan refleksi dari wataknya.

Sedangkan dalam pandangan Thomas Lickona, karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespon situasi atau keadaan secara bermoral. Sifat alami itu diwujudkan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, respek terhadap orang lain dan karakter mulia lainnya.¹⁸

Pengertian yang dikemukakan oleh Lickona ini, mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Aristoteles, bahwa karakter itu erat kaitannya dengan *habit* atau kebiasaan yang terus menerus dilakukan.¹⁹

Senada dengan Lickona, Sudewo mengemukakan bahwa karakter merupakan kumpulan atau akumulasi dari perilaku baik dari seorang anak manusia yang

IAIN PALOPO

¹⁷ Agus Wibowo dan Hamrin, *Menjadi Guru Berkarakter, Strategi Membangun Kompetensi dan Karakter Guru*, (Cet. I; Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2012), h. 42.

¹⁸ Thomas Lickona, *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*, (New York: Bantam Books, 1992), h. 22.

¹⁹ Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter, Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*, (Cet. I; Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2012), h. 33.

dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari.²⁰ Menurutnya, perilaku (tingkah laku) yang baik dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, itulah karakter.

Dalam terminologi Islam, pengertian karakter memiliki kedekatan pengertian dengan pengertian “akhlak”.²¹ Kata Akhlak berasal dari kata *khalaqa* (bahasa Arab) yang berarti perangai, tabiat dan adat istiadat. Menurut pendekatan etimologi kata “akhlak” berasal dari bahasa Arab, jamak dari bentuk mufradnya (tunggal) *khuluqun* (*خُلُقٌ*) yang secara lugawi diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.²² Kalimat ini mengandung persesuaian dengan dengan kata *khalqun* (*خَلْقٌ*) yang berarti kejadian, serta erat kaitannya dengan *khâliq* (*خَالِقٌ*) yang berarti Pencipta dan *makhlûq* (*مَخْلُوقٌ*) yang berarti yang diciptakan.²³

Dalam tinjauan kebahasaan, Abd. Hamid Yunus menyatakan bahwa:

الأَخْلَاقُ هِيَ صِفَاتُ الْإِنْسَانِ أَدَابِيَّةً.²⁴

“Akhlak ialah segala sifat manusia yang terdidik”

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, potensi manusia apabila dibina dan diarahkan dengan baik maka akan berimplikasi positif dan melahirkan akhlak mulia (*akhlâq al-karîmah*), demikian pula sebaliknya, apabila tidak dibina dan

²⁰ Arie Sudewo, *Best Parctie Character Building, Menuju Indonesia Lebih Baik*, (Cet. II; Jakarta: Republika, 2011), h. 13.

²¹ Anton M. Moeliono, *op. cit.*, h. 880.

²² Luis Ma'luf, *Al-Munjid*, (Beirut: al-Maktabah Al-Katulikiyah, t.t.), h. 194.

²³ Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter, Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 65.

²⁴ Abd. Hamid Yunus, *Dairat al-Ma'ârif II*, (Kairo: Asy-Syab, t.t.), h. 346. Dikutip oleh Zubaedi, *Ibid.*, h. 66.

diarahkan secara tepat akan berimplikasi negatif dan melahirkan akhlak tercela (*akhlâq al-mazmûmah*).

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Syams /91:8:

فَأَهْمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ

Terjemahnya:

Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.²⁵

Sedangkan al-Ghazali (1058-1111 M.), seperti dikutip oleh Zubaedi, mendefinisikan akhlak sebagai berikut:

الْخُلُقُ عِبَارَةٌ عَنْ هَيْئَةِ فِي النَّفْسِ رَاسِخَةٍ عَنْهَا تَصْدُرُ الْأَفْعَالُ بِسُهُولَةٍ وَيُسْرٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى
فِكْرٍ وَرُويَةٍ.²⁶

Artinya:

Akhlak adalah suatu perangai (watak/tabiat) yang menetap dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa dipikirkan atau direncanakan sebelumnya.

Pengertian akhlak seperti di atas hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Ibnu Maskawaih, yang mendefinisikan akhlak sebagai berikut:

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Hilal, 2010), h. 595.

²⁶ *Ibid.* h. 67.

حَالٌ لِلنَّفْسِ دَاعِيَةٌ لَهَا إِلَى أفعالِهَا مِنْ غَيْرِ فِكْرٍ وَرُويَةٍ²⁷

Artinya:

“Akhhlak adalah suatu keadaan jiwa yang menyebabkan timbulnya perbuatan tanpa melalui pertimbangan dan dipikirkan secara mendalam.”

Dari berbagai pengertian akhlak di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah suatu keadaan jiwa atau situasi psikologis manusia yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa terlebih dahulu memikirkannya secara mendalam, karena keadaan itu telah melekat dalam dirinya.

Jadi, karakter dan akhlak memiliki makna yang hampir sama, hanya saja kedua istilah ini ranah penggunaannya terkadang berbeda, misalnya, istilah akhlak cenderung digunakan dalam konteks pendidikan Islam, sedangkan karakter cenderung digunakan dalam konteks pendidikan umum, akan tetapi substansinya sama.

Dalam kaitannya dengan pendidikan, istilah karakter atau akhlak sangat urgen kedudukannya, karena terkait erat dengan kepribadian pendidik (guru) dan peserta didik (murid) yang berinteraksi secara kontinu dalam proses pendidikan. Di sinilah letak pengaruh karakter atau akhlak seorang guru yang akan menjadi contoh atau model bagi seluruh peserta didiknya, karena itu, nilai-nilai keteladanan yang bersumber dari karakter atau akhlak wajib untuk diimplementasikan.

Keberhasilan guru dalam mengajar dan mendidik siswa bukanlah diukur dari kompetensi intelektualnya semata, tetapi sejauh mana guru mampu membentuk

²⁷ *Ibid.*

karakter peserta didiknya. Dan semua itu hanya dapat dilakukan dengan menampilkan keteladanan dalam ucapan, sikap dan perbuatan.

Muhammad Abdullah Ad-Duweisy menegaskan bahwa, kontradiksi antara ucapan dan perbuatan, baik lahir maupun batin, semrawut dan rancunya pengajaran, semua itu merupakan masalah terbesar generasi masa kini. Semua itu bersumber dari satu hal, yaitu ilmu yang tidak diamalkan.²⁸ Di sinilah guru dituntut untuk menjadi model atau teladan yang konsisten dalam mengimplementasikan ilmunya, sehingga menjadi panutan bagi seluruh peserta didiknya.

Ibnu Abbas r.a. berkata, sebagaimana yang dikutip oleh Izzuddin Karimi: “Barang siapa ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya, maka dia telah mencoreng dirinya.”²⁹ Ungkapan ini menekankan pula pentingnya komitmen dan konsistensi, terutama bagi kaum pendidik, agar memberi pengaruh yang positif terhadap pembentukan karakter peserta didik.

Dalam konteks inilah, Imam Syafi’i (150-204 H.) mewasiatkan kepada pendidik anak-anak Khalifah Harun Al-Rasyid, “Mulailah dalam mendidik anak-anak Amirul Mukminin dengan mendidik dirimu sendiri. Karena mata mereka tertambat

²⁸ Muhammad Abdullah Ad-Duweisy, “Al-Mudarris wa Mahârâti al-Taujîh”, diterjemahkan oleh Izzuddin Karimi, dengan judul *Menjadi Guru yang Sukses dan Berpengaruh*, (Cet. VIII; Surabaya: eLBA, 2011), h. 70.

²⁹ *Ibid.*

kepadamu. Baik, menurut mereka adalah apa yang kamu anggap baik. Dan buruk bagi mereka adalah apa yang kamu benci.”³⁰

Keteladanan dari para guru menjadi salah satu unsur penting dalam pembentukan karakter peserta didik dalam dunia pendidikan, sebagaimana Rasulullah saw. telah berhasil mendidik keluarga dekat dan para sahabatnya serta para pengikutnya dengan menampilkan keteladanan. Hal ini dipertegas oleh Allah swt. dalam QS. al-Ahzâb/33:21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۖ

Terjemahnya:

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.³¹

Demikian pula dengan penegasan Allah swt. tentang keagungan karakter (akhlak) Rasulullah saw., Allah swt berfirman dalam QS. al-Qalam/68: 4

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۖ

Terjemahnya:

IAIN PALOPO

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.³²

Sedangkan Ujian Nasional adalah evaluasi belajar yang diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tiap akhir tahun pelajaran, sesuai

³⁰ *Ibid.*

³¹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 420.

³² *Ibid.*, h. 564.

jenjang lembaga pendidikan, baik tingkat dasar maupun tingkat menengah, dengan mata pelajaran umum, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan Bahasa Inggris, serta mata pelajaran jurusan untuk tingkat menengah atas dan kejuruan.

Evaluasi dilakukan dengan tujuan pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 57 ayat 1.³³

Penyelenggaraan ujian nasional selalu menuai kritik dari berbagai pihak karena adanya perilaku kecurangan yang sistemik dan massif, realitas ini sangat bertentangan dengan konsep pendidikan karakter yang selama ini diwacanakan oleh pemerintah.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi profesionalitas dan karakter guru dalam mewujudkan pendidikan karakter yang berbasis keteladanan. Penelitian ini menekankan pada upaya menjadi guru profesional dan memiliki karakter unggul, dengan terlebih dahulu memotret realitas guru masa kini, khususnya era reformasi, selanjutnya menelaah tentang profesionalisme guru yang mengacu kepada standar kompetensi guru, yaitu Kompetensi Profesional, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Paedagogik dan Kompetensi sosial, yang mengacu kepada Undang-

³³ *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: SL Media, 2011), h. 35.

Undang RI nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta pendidikan karakter melalui keteladanan yang di dalamnya *includ* Kompetensi Keagamaan (religius).

Profesionalitas guru menjadi salah satu penentu keberhasilan pendidikan, seperti yang dikemukakan oleh Rahman Getteng, bahwa guru sebagai salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar (KBM), memiliki kompetensi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama guru ialah merancang, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran.³⁴

Pendidikan karakter, dalam konteks ke-Indonesia-an menjadi kebutuhan utama, karena generasi bangsa ini sedang mengalami penyakit dekadensi moral yang akut. Maka, proses pendidikan karakter harus dimulai dari guru, sebagaimana yang dikemukakan oleh Agus Wibowo dan Hamrin, bahwa seorang guru, selain harus memiliki pemahaman dan kompetensi mengenai karakter, ia juga dituntut mempunyai karakter-karakter baik dalam dirinya sendiri, mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat, dan menjadikannya sebagai bagian yang integral dalam hidup.³⁵

Di sinilah korelasi profesionalisme guru dengan keteladanan dalam pendidikan karakter, pasalnya, bagaimana mungkin mau mengajarkan dan menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik, sementara guru sebagai pendidik tidak memahami apalagi mempraktikkan dalam kehidupan nyata? Pendek kata, seorang

³⁴ Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika*, (Cet. VII; Yogyakarta: Grha Guru, 2012), h. 2.

³⁵ Agus Wibowo dan Hamrin, *op. cit.*, h. 47.

guru harus menampilkan keteladanan, jika ia ingin menumbuh-kembangkan karakter dalam diri peserta didiknya, sebab jika yang terjadi sebaliknya, maka yang terjadi adalah *malpraktik pendidikan*. Sebagaimana pepatah dalam bahasa Arab, “*Faqid al-syai’ lâ yu’tî*” (Orang yang tidak memiliki apa-apa tidak mungkin dapat memberi).³⁶

Dengan demikian, secara umum judul tesis ini mengandung pengertian tentang upaya integratif menjadi guru yang profesional, sekaligus memiliki karakter yang diimplementasikan dalam kehidupan nyata, sehingga menjadi model atau teladan bagi peserta didik.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, yang menjadi inti pembahasan adalah kajian tentang peningkatan *Profesionalitas dan Karakter Guru sebagai Strategi dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter yang Berbasis Keteladanan*. Kajian ini sengaja diangkat dengan pertimbangan bahwa menurut pengetahuan penulis, belum ada tulisan yang secara khusus membahas tentang hal itu secara integratif. Tulisan-tulisan yang membahas tentang profesionalisme dan karakter guru, belum mengungkap kerangka yang utuh mencakup aspek-aspek pendidikan karakter, terutama hal-hal yang bersifat praktis operasional.

Di antara tulisan yang menjelaskan tentang upaya menjadi guru profesional adalah Enco Mulyasa, di dalam buku *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan*

³⁶ Mustafa Mashur, “Min Fiqh al-Da’wah” diterjemahkan oleh Abu Ridho dkk. dengan judul *Fiqh Dakwah I*, (Cet. XII; Jakarta: al-I’tisâm, 2012), h. 274.

Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan, Beliau menjelaskan tujuh kesalahan yang sering dilakukan guru (hal. 19-30), peran guru dalam pembelajaran (hal. 35-64), dan pendekatan dan metode pembelajaran serta regulasi-regulasi pemerintah tentang guru.³⁷ Kesemuanya itu merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalitas guru, demi mewujudkan hasil pendidikan yang berkualitas, namun tidak menguraikan karakter guru.

Ahmad Baedowi dalam bukunya, *Calak Edu Esai-Esai Pendidikan 2008-2012 Jilid 1 dan 2*, mengkritik budaya plagiasi yang dilakukan oleh sebagian guru ketika proses sertifikasi, ia mengemukakan bahwa, karakter guru ternodai oleh perilaku plagiasi karya tulis ilmiah dalam proses sertifikasi jalur portofolio.³⁸ Hal ini mengisyaratkan bahwa, kompetensi guru dalam menyusun karya tulis ilmiah sangat rendah. Di samping itu, ia juga menyoroti perilaku curang dalam Ujian Nasional.³⁹

Sedangkan tulisan yang menyangkut tentang pendidikan karakter di antaranya adalah, *Best Practice Character Building, Menuju Indonesia Lebih Baik*, yang ditulis oleh Arie Sudewo. Ia mengemukakan bahwa, perilaku baik adalah karakter, dan merupakan modal bangsa, tapi tanpa karakter kecerdasan akan membodohi orang lain.⁴⁰ Beliau mengkritik model pendidikan yang hanya mengedepankan

³⁷ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Cet. XI, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).

³⁸ Ahmad Baedowi, dalam Yanto Musthofa (Ed.), *Calak Edu Esai-Esai Pendidikan 2008-2012 Jilid 1*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012), h. 43.

³⁹ *Ibid.*, h. 93.

⁴⁰ Arie Sudewo, *op.cit.*, h. 251.

intelektualitas, tanpa memperhatikan karakter guru yang akan memberi keteladanan dalam pendidikan.

Di samping itu, ada pula tulisan Retno Listyarti yang berjudul *Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Inovatif dan Kreatif*, yang banyak mengulas tentang model pembelajaran aktif, kreatif dan inovatif khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang berorientasi kepada pendidikan karakter. Dan hal ini akan tercapai apabila ditopang oleh profesionalitas guru sebagai tenaga pendidik dan lingkungan sekolah.

Dalam pandangan Retno, proses pendidikan karakter itu harus didasarkan pada totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, dan psikomotorik) dan fungsi totalitas sosiokultural dalam konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.⁴¹ Pendidikan karakter dalam konteks ini bersifat komprehensif, bukan hanya dalam lingkungan pendidikan formal (sekolah), tapi juga diterapkan dalam lingkup keluarga dan masyarakat.

Selanjutnya, ada juga buku yang secara spesifik membahas tentang upaya *Menjadi Guru Berkarakter, Strategi Membangun Kompetensi dan Karakter Guru*, yang ditulis oleh Agus Wibowo dan Hamrin. Menurut keduanya, guru berkarakter itu penting, mengingat tugasnya bukan sekedar mentransfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai yang diperlukan anak didik

⁴¹ Retno Listyarti, *Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Inovatif dan Kreatif*, (Cet. II; Jakarta: Esensi, 2012), h. 8.

guna mengarungi kehidupan yang akan datang.⁴² Sejalan dengan itu, Uhar Suharsaputra juga menulis buku yang judul pokoknya sama, yaitu *Menjadi Guru Berkarakter*, menurut Suharsaputra, guru yang sukses adalah guru yang berkepribadian baik, dan guru yang berkepribadian baik adalah guru yang berkarakter.⁴³ Dalam buku ini, penulisnya banyak menyuguhkan gagasan-gagasan refleksi diri seorang guru agar menyadari tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tidak mengalami disorientasi dalam menjalankan profesinya.

Masih banyak buku-buku yang membahas tentang profesionalisme guru, karakter guru dan pendidikan karakter, misalnya *Menuju Guru Profesional dan Beretika*, yang ditulis oleh Abd. Rahman Getteng, *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*, yang ditulis oleh Thomas Lickona, dan buku yang berjudul *Guruku Panutanku* yang ditulis oleh Sigit Setyawan, serta buku yang berjudul *Membangun Karakter dengan Hati Nurani*, yang ditulis oleh Akh. Muwafik Saleh. Ada juga buku *best seller* nasional yang ditulis oleh Jamal Ma'mur Asmani, berjudul *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif dan Inovatif*, selain itu ada juga buku yang berjudul *Menjadi Guru Favorit*, yang ditulis oleh Asep Umar Fakhruddin.

Meskipun banyak buku-buku yang membahas tentang profesionalisme guru dan karakter guru, serta pendidikan karakter, tetapi masih bersifat terpisah antara

⁴² Agus Wibowo dan Hamrin, *op. cit.*, h. 48.

⁴³ Uhar Suharsaputra, *Menjadi Guru Berkarakter*, (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 61.

profesionalitas dan karakter guru. Namun demikian, penulis merasa sangat terbantu dan dimudahkan dalam melakukan penelitian.

Untuk itu, tulisan ini akan mengakumulasi dari semua itu, menjadi konsep ilmiah guna memperkaya khazanah keilmuan pendidikan. Dengan menampilkan formulasi baru tentang integrasi antara profesionalisme dan karakter guru yang berbasis pada keteladanan, sebagai respons atau jawaban terhadap kasus kecurangan Ujian Nasional yang melibatkan kaum guru secara sistemik dan terstruktur, sehingga citra profesional dan berkarakter menjadi pudar di mata peserta didik. Pengintegrasian profesionalisme dan karakter guru dalam dunia pendidikan dapat menjadi proses akseleratif untuk mewujudkan pendidikan karakter.

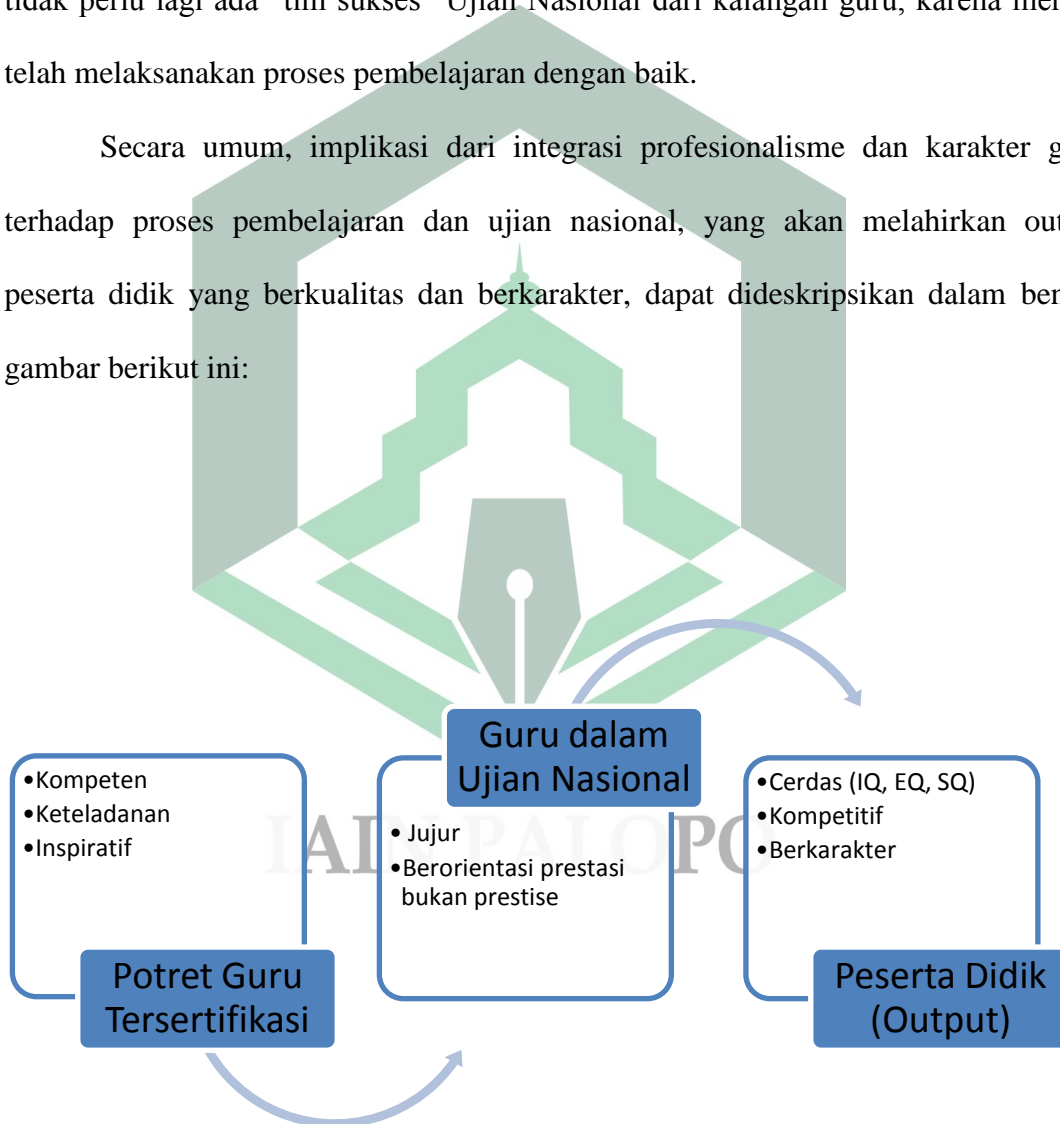
E. Kerangka Pikir

Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia (*human humanization*) dengan segala potensi yang dimilikinya, baik dari segi intelektual, emosional, maupun spiritual, yang dilakukan oleh guru sebagai pemeran utama dalam proses pendidikan.

Peran guru yang sangat strategis dalam proses pendidikan ini, harus dibekali dengan berbagai macam kompetensi untuk meraih predikat profesional, seperti kompetensi keribadian, kompetensi profesional, kompetensi paedagogik, dan kompetensi sosial, serta karakter yang unggul, sehingga menjadi teladan bagi peserta didik.

Dengan integrasi profesionalisme dan karakter dalam diri seorang guru, tentu saja akan mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, proses yang baik itu akan menghasilkan hasil (*output*) yang baik pula, yakni generasi terdidik dan berkarakter yang menjadi penopang peradaban bangsa ke depan. Jadi, tidak perlu lagi ada “tim sukses” Ujian Nasional dari kalangan guru, karena mereka telah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik.

Secara umum, implikasi dari integrasi profesionalisme dan karakter guru terhadap proses pembelajaran dan ujian nasional, yang akan melahirkan output peserta didik yang berkualitas dan berkarakter, dapat dideskripsikan dalam bentuk gambar berikut ini:



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian berdasarkan data deskriptif berupa lisan atau kata tertulis. Metode ini disebut juga sebagai metode interpretatif (*interpretative research*), karena hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ada di lapangan.⁴⁴ Data-data deskriptif ini bersumber dari literatur-literatur yang diteliti meliputi buku-buku yang berkaitan dengan profesionalisme dan karakter guru dan buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan karakter, serta yang berkaitan dengan ujian nasional. Dari literatur tersebut dapat ditemukan berbagai pendapat yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data Penelitian ini diperoleh dari buku-buku atau bacaan yang relevan dengan pembahasan Profesionalisme dan Karakter Guru, baik yang berkaitan dengan kompetensi, maupun karakter guru dalam menyikapi Ujian Nasional. Sumber data tersebut dibedakan menjadi dua, yakni sumber data primer (utama) dan sekunder.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 7-8.

Sumber data primer adalah data otentik yang berasal dari sumber utama.⁴⁵ Sumber dalam penelitian ini yaitu *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*, yang ditulis oleh Thomas Lickona, *Ta'lim al-Muta'allim*, *Tharîq al-Ta'lim*, yang ditulis oleh Imam Burhanul Islam al-Zarnûjî. Selain buku-buku tersebut, dalam penelitian ini juga tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan buku-buku lain yang relevan dengan penelitian ini, termasuk data-data yang bersumber dari surat kabar, internet atau artikel-artikel pendidikan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber data sekunder merupakan data pelengkap yang berhubungan dengan dengan masalah penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk menganalisis pengaruh profesionalisme dan karakter guru dalam mewujudkan pendidikan karakter yang berbasis pada keteladanan, ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan paedagogis, psikologis, dan yuridis.

Pendekatan Paedagogis digunakan untuk memahami upaya menjadi guru profesional dan berkarakter dengan mengacu kepada kompetensi yang disyaratkan, sebagai strategi dalam mewujudkan pendidikan karakter yang berbasis pada keteladanan.

⁴⁵Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 216.

Pendekatan Psikologis yaitu pendekatan dengan melihat permasalahan dari perspektif ilmu jiwa melalui gejala perilakunya. Dimensi kejiwaan manusia merupakan hal mendasar yang perlu dipahami oleh praktisi pendidikan, khususnya guru sebagai pendidik dalam menanamkan nilai-nilai dan menumbuh-kembangkan karakter peserta didik.

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang mengacu kepada aturan-aturan atau regulasi-regulasi pemerintah tentang pendidikan nasional dan keguruan, dan aturan-aturan yang menjadi derivasinya, sebagai landasan hukum yang konstitusional.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran referensi dalam buku-buku yang berkaitan dengan profesionalisme guru dan pendidikan karakter atau sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Untuk memudahkan klasifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, peneliti menggunakan kartu ikhtisar, kartu kutipan, dan kartu ulasan. Kartu ikhtisar berisi rangkuman hasil bacaan yang digunakan sebagai bahan kutipan tidak langsung. Kartu kutipan berisi catatan lengkap sebagai kutipan langsung yang sesuai dengan tulisan dalam buku. Sedangkan kartu ulasan berisi catatan tentang kritik, penafsiran atau penjabaran dari materi yang dibaca. Selain berisi catatan, ketiga kartu tersebut juga memuat nama pengarang, judul buku, nama penerbit, tempat terbit, tahun terbit, halaman yang dikutip, dan informasi jilid, serta cetakan buku tersebut.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari suatu sumber diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Penarikan kesimpulan dilakukan dengan kesimpulan yang bersifat induktif, deduktif, atau komparatif. Kesimpulan induktif dimulai dari data yang bersifat khusus, kemudian dibuat kesimpulan yang bersifat umum. Kesimpulan deduktif dilakukan dengan menganalisis data yang bersifat umum dan diperkuat dengan data yang bersifat khusus. Sedangkan kesimpulan komparatif dilakukan dengan membandingkan beberapa pendapat, data, dan teori sehingga melahirkan konsep baru

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya menjadi guru profesional dan berkarakter sebagai strategi mewujudkan pendidikan karakter berbasis keteladanan. Selanjutnya tujuan utama tersebut dapat diperinci ke dalam beberapa tujuan spesifik, yaitu:

- a. Untuk mendeskripsikan potret guru dalam program sertifikasi.
- b. Untuk mendeskripsikan profesionalisme guru dan realitas dalam menyikapi Ujian Nasional.
- c. Untuk mengintegrasikan profesionalisme dan karakter guru sebagai strategi dalam mewujudkan pendidikan karakter yang berbasis keteladanan. Dan sebagai respon atau jawaban terhadap kasus kecurangan dalam Ujian Nasional (UN).

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan berguna untuk:

- a. Kegunaan ilmiah (*academic significance*), yakni dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pendidikan dan menjadi bahan bacaan bagi insan akademik khususnya yang menyangkut konsep menjadi guru profesional dan berkarakter, sebagai strategi mewujudkan pendidikan karakter berbasis keteladanan.
- b. Kegunaan Praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam yang tidak terpisahkan dari pendidikan karakter (akhlak), lebih khusus lagi kepada kaum guru yang menjadi pioner dalam dunia pendidikan, sehingga hasil penelitian ini bisa menjadi referensi dalam melaksanakan proses pendidikan yang lebih baik.

H. Garis-Garis Besar Isi

Tesis ini terdiri dari lima bab yang terbagai ke dalam satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan, dan satu bab penutup. Pendahuluan merupakan Bab I yang berisi tentang latar belakang masalah yang menguraikan pokok pikiran yang menjadi latar belakang, masalah upaya menjadi guru profesional dan berkarakter, sebagai strategi mewujudkan pendidikan karakter berbasis keteladanan. Selanjutnya ada rumusan masalah yang bertujuan agar pembahasan lebih mendalam dan sistematis. Selanjutnya definisi operasional dan ruang lingkup pembahasan. Dalam bab ini pula terdapat kajian pustaka sebagai telaah atas karya-karya terdahulu dan relevansinya

dengan kajian penelitian ini. Ada juga tujuan dan kegunaan hasil penelitian serta garis-garis besar isi proposal tesis.

Bab II Membahas tentang potret guru dalam sertifikasi. Dalam bab ini dideskripsikan tentang realitas guru dalam menghadapi program Sertifikasi berdasarkan fenomena yang ada, Kompetensi Guru dalam pendidikan, dan Konsekuensi sertifikasi guru terhadap kualitas pendidikan.

Bab III membahas tentang profesionalisme guru dalam menghadapi Ujian Nasional (UN). Dalam bab ini dideskripsikan sikap guru saat menghadapi Ujian Nasional, Kecurangan Sistemik dalam Ujian Nasional, dan Tawaran solutif terhadap pelaksanaan Ujian Nasional.

Bab IV membahas tentang bagaimana mengintegrasikan profesionalisme dan karakter guru dalam pendidikan melalui keteladanan. Bab ini meliputi; Korelasi antara Profesionalisme dan Karakter Guru, Urgensi Keteladanan dalam Pendidikan, dan Upaya Memulihkan Citra dan Karakter Guru.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan sekaligus sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan. Selain itu, dalam bab ini juga dikemukakan saran-saran dan implikasi penelitian.

BAB II

POTRET GURU DALAM SERTIFIKASI

A. Realitas Guru Dalam Sertifikasi

Program sertifikasi guru yang telah dilaksanakan oleh pemerintah merupakan amanah dari Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 42 dan 61, Undang-Undang Republik Indonesia 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 dan 11, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 29, dan Permendiknas Nomor 18 tahun 2007.⁴⁶ Keempat regulasi inilah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program sertifikasi guru di Indonesia.

Proses sertifikasi dapat ditempuh dengan dua cara (jalur), yaitu melalui penilaian portofolio dan melalui jalur pendidikan.

1. Jalur Portofolio

Ketika proses sertifikasi melalui jalur portofolio mulai diberlakukan sejak tahun 2007, di sini permasalahan mulai muncul dari kalangan guru, karena banyak menyiapkan dokumen-dokumen prestasi selama mengajar berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Salah satu dokumen yang harus disiapkan adalah karya ilmiah, baik berupa makalah yang telah dipresentasikan, artikel yang telah dipublikasikan atau penelitian tindakan kelas (PTK) dan sejenisnya.

⁴⁶Yudha Pandu (ed.), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, (Cet. I; Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2008), h. 58.

Realitasnya, banyak guru yang tidak mengasah kemampuan intelektualnya untuk menulis karya ilmiah, sehingga mereka menempuh jalan plagiasi (pemalsuan) karya tulis ilmiah demi tuntutan persyaratan sertifikasi. Seperti yang terjadi di Provinsi Riau, sekitar 1.700 guru yang melakukan tindak pemalsuan pembuatan karya ilmiah sebagai syarat sertifikasi guru, dengan menggunakan jasa calo, dan kebanyakan bahan diambil dari *google*.⁴⁷ Tindakan seperti ini jelas tidak sesuai dengan prinsip profesionalitas dan karakter kaum pendidik (guru) yang seharusnya menjadi teladan.

Indikasi semacam ini tidak tertutup kemungkinan terjadi pula di daerah lain dengan motif dan modus yang serupa. Di beberapa kabupaten/kota di Jabodetabek, bahkan disinyalir terbentuk ‘tim sukses’ sertifikasi di Kandepag dan dinas pendidikan kota. Pola kerja mereka biasanya dengan membuat serangkaian sertifikat dan karya ilmiah, kemudian ketika dana sertifikasi guru cair, persentase pembagian pun dilakukan berdasarkan transaksi awal.⁴⁸ Motif yang demikian ini sangat terkesan hedonis dan keluar dari tujuan mulia sertifikasi, yakni meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan.

Kondisi ini terjadi disebabkan karena lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja guru dari dinas pendidikan setempat, terutama dalam hal penulisan karya ilmiah. Seharusnya, dinas pendidikan di kabupaten/kota, melalui supervisor

⁴⁷Ahmad Baedowi, “Plagiat” dalam Yanto Musthofa (Ed.), *Calak Edu: Esai-Esai Pendidikan 2008-2012 Jilid 1*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012), h. 42.

⁴⁸*Ibid.*

(pengawas) secara kontinu memberikan pelatihan dan penugasan kepada guru untuk menulis atau menyusun karya ilmiah, dengan memberikan *reward* dan *punishment*, serta menetapkan sebuah regulasi yang mengatur tentang kewajiban bagi setiap guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menyusun karya ilmiah, pada saat proses kenaikan pangkat/golongan.

Jika regulasi semacam ini ditetapkan, maka sudah dapat dipastikan akan muncul semangat kompetitif dari kalangan guru untuk berkreasi dan berinovasi dalam karya ilmiah, yang selanjutnya diverifikasi secara obyektif oleh pihak yang berwenang guna menghindari plagiasi.

2. Jalur Pendidikan

Pada mulanya, sertifikasi jalur pendidikan diberlakukan bagi guru yang tidak memenuhi standar minimal kelulusan dalam skor penilaian portofolio, dan selanjutnya dikirim untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) pada Perguruan Tinggi di setiap rayon yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) didesain sebagai media untuk memberikan latihan dan tempat pendidikan lebih lanjut bagi para guru yang tidak lolos dalam penilaian portofolio, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kompetensi guru ke tingkat profesionalisme sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁴⁹ Proses ini lebih obyektif dan terukur penilaiannya dibanding dengan sistim

⁴⁹Bedjo Sujanto, *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*, (Cet. I; Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), h. 27.

portofolio yang berlandaskan verifikasi administratif, karena para assesor atau tim penilai berinteraksi langsung dengan peserta PLPG.

Disamping itu, di awal pelaksanaan PLPG, kemampuan guru akan dites terlebih dahulu sesuai bidang studi yang diampunya.⁵⁰ Selama mengikuti diklat profesi ini, guru akan menerima pendalaman materi yang mencakup empat aspek penting, yaitu paedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Di akhir pelatihan, seluruh peserta akan diuji kembali dengan ujian tertulis dan ujian praktik mengajar.⁵¹

Sejak tahun 2011 tidak diberlakukan lagi proses sertifikasi jalur portofolio, yang ada hanya PLPG, bahkan saat ini, para guru yang bernaung dalam lingkup Kementerian Agama RI sudah diberlakukan sertifikasi jalur PPG (Pendidikan Profesi Guru) selama satu tahun (dua semester) dan disusul oleh para guru yang bernaung dalam lingkup Kemendikbud.

Meskipun demikian obyektif dan terukur nya sertifikasi jalur PLPG dan PPG, bukan berarti tidak menimbulkan masalah, sebab akhir-akhir ini terbongkar kasus pemalsuan ijazah PPG yang melibatkan beberapa oknum guru untuk kepentingan sertifikasi di Sulawesi Selatan (yakni di kabupaten Bone, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto), seperti yang diberitakan dalam koran harian FAJAR.⁵² Dalam pemberitaan tersebut, Direktur Pengembangan Profesi Guru (P3G), Abdullah

⁵⁰Saat ini, Tes pra PLPG ini disebut dengan istilah Ujian Kompetensi Awal (UKA), apabila guru calon peserta sertifikasi dinyatakan lulus pada ujian ini, maka ia berhak untuk mengikuti PLPG, dan sebaliknya, apabila dinyatakan tidak lulus maka guru yang bersangkutan tidak bisa mengikuti PLPG, dan harus menunggu tahun berikutnya.

⁵¹*Ibid.*

⁵²Harifuddin, "Beli ijazah Palsu Demi sertifikasi", *Fajar*, edisi 14 Januari 2014, h. 17.

Pandang menyatakan bahwa, hampir setiap tahun ditemukan kasus seperti ini. Sehingga pihak Universitas Negeri Makassar (UNM) melayangkan surat gugatan ke BKN untuk segera menganulir status PNS oknum guru yang telah melakukan pemalsuan ijazah tersebut.

Kasus pemalsuan ijazah seperti ini tidak menutup kemungkinan terjadi pula di daerah-daerah lain, dan bila ditinjau dari aspek pendidikan tentu saja tidak dapat ditolerir. Sebab, sosok PNS yang berprofesi sebagai guru (pendidik) harus memberikan keteladanan dalam keilmuan, keteladanan dalam sikap mental (*mental attitude*) dan keteladanan dalam kinerja, agar ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada peserta didik membawa manfaat dan keberkahan bagi peserta didik.

Di samping itu, dampak negatif dari perilaku curang yang dilakukan oleh orang yang berprofesi sebagai guru akan nampak terhadap akseptabilitas peserta didik yang kurang memberi rasa hormat terhadap sang guru. Jelas hal ini berkaitan dengan karakter keteladanan.

Jadi, seyogyanya orang yang berprofesi sebagai guru (pendidik) hendaknya memiliki kualitas keilmuan yang memadai dengan bukti formal berupa ijazah akademik atau sertifikat yang legal dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan kredibel, dan memiliki kepribadian yang kokoh, bukan orang yang terobsesi dengan gaji atau tunjangan sertifikasi semata.

Guru yang memiliki kualitas keilmuan dan kepribadian yang baik, berarti ia telah memberikan atensi dan penghormatan kepada ilmu dan ahli ilmu (guru yang telah mengajar dan mendidiknya), dan secara tidak langsung telah memberikan

pendidikan karakter kepada peserta didik tentang cinta ilmu dan hormat kepada guru. Tetapi sebaliknya, guru yang berlaku curang dalam mengejar cita-cita dan menjalankan profesinya, berarti ia telah melecehkan ilmu pengetahuan, dan sekaligus telah mengabaikan pendidikan karakter cinta ilmu dan patuh kepada guru bagi peserta didik.

Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa kualitas keilmuan dan kepribadian guru berimplikasi terhadap daya serap (*intake*) peserta didik secara kognitif, dan pembentukan sikap mentalnya secara afektif. Artinya, ada efek timbal balik antara pendidik dan peserta didik.

Implikasi seperti inilah yang harus menjadi landasan berpikir para pengajar sebelum terjun ke dalam dunia pendidikan, karena tugas mereka bukan sekedar mentransfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) kepada peserta didik, tetapi juga membentuk dan mengembangkan karakter mereka menjadi lebih baik. Hal ini hanya dapat terwujud jika yang melakukannya adalah tenaga pendidik yang memiliki kualitas keilmuan yang baik (profesional) dan memiliki kualitas kepribadian yang tangguh, yakni pendidik yang memiliki idealisme dan panggilan jiwa.

B. Kompetensi Guru dalam Pendidikan

1. Pengertian Kompetensi

Salah satu komponen yang sangat menentukan kualitas *output* sebuah institusi pendidikan adalah guru. Apabila kualitas guru yang menjadi tenaga pendidik memiliki kualitas yang baik, maka hasilnya akan baik, demikian pula sebaliknya. Dalam konteks pendidikan nasional, peningkatan mutu atau kualitas tenaga pendidik

(guru) sedang dilaksanakan secara kontinu guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional, berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut, disebutkan “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan kuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”.⁵³ Robert Houton, sebagaimana dikutip oleh M. Arifin, mendefinisikan kompetensi sebagai “*competence is adequacy for a task or as possession of required knowledge, skill and abilities.*”⁵⁴ Artinya, kompetensi adalah kemampuan yang memadai untuk melaksanakan tugas atau memiliki pengetahuan, keterampilan dan kecakapan yang dipersyaratkan untuk itu.

Sedangkan menurut Charles E. Johnson, seperti yang dikutip oleh Wibowo dan Hamrin, mengatakan bahwa: “*Competency as a rational performance wich satisfactory meets the objective for a desired condition.*”⁵⁵ Artinya, kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Dari beberapa definisi kompetensi di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah suatu yang mendeskripsikan kualifikasi atau kemampuan

⁵³Yudha Pandu (ed.), *op.cit.*, h. 3.

⁵⁴M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan: Islam dan Umum*, (Jakarta: Bumi Akasa, 1991), h. 112.

⁵⁵Agus Wibowo dan Hamrin, *Menjadi Guru Berkarakter: Strategi Membangun Karakter Kompetensi dan Karakter Guru*, (Cet. I: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 103.

seseorang baik dalam hal pengetahuan, keterampilan maupun kepiawaiannya dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas tertentu.

Dalam kaitannya dengan pendidikan, maka secara sederhana, kompetensi guru dapat dipahami sebagai akumulasi dari pengetahuan, keterampilan (*skill*) dan sikap atau perilaku dari seorang guru dalam menjalankan profesinya sebagai tenaga pengajar dan pendidik.

2. Macam-macam Kompetensi Guru

Dalam ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa kompetensi guru di Indonesia meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.⁵⁶ Keempat kompetensi ini wajib dimiliki oleh setiap guru, sehingga layak disebut sebagai guru profesional.

a. Kompetensi Paedagogik

Kompetensi paedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap karakteristik siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya.⁵⁷

⁵⁶Yudha Pandu (ed.), *op. cit.*, h. 6. Lihat juga *Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, Bab IV Pasal 28 ayat 3.

⁵⁷Munif Chatib, *Gurunya Manusia: Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara*, (Cet. XII; Bandung: Kaifa, 2013), h. 28.

Menurut Sagala, kompetensi paedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi:

- 1) pemahaman guru tentang landasan dan filsafat pendidikan;
- 2) guru memahami potensi dan keragaman peserta didik, sehingga mampu mendesain model pembelajaran yang kreatif;
- 3) guru mampu mengembangkan kurikulum/silabus pembelajaran dengan baik;
- 4) guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar;
- 5) mampu melaksanakan yang mendidik dengan suasana dialogis interaktif;
- 6) mampu melakukan evaluasi hasil belajar sesuai prosedur dan standar yang dipersyaratkan; dan
- 7) mampu mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.⁵⁸

Senada dengan itu, Mulyasa mengemukakan bahwa, kompetensi paedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang meliputi:

- 1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
- 2) Pemahaman terhadap peserta didik
- 3) Pengembangan kurikulum/silabus
- 4) Perancangan pembelajaran
- 5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- 6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran
- 7) Evaluasi hasil belajar (EHB)
- 8) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya⁵⁹

Sedangkan Munif Chatib menambahkan, kompetensi paedagogik seorang guru meliputi juga pemahaman terhadap karakteristik peserta didik secara umum, dan

⁵⁸Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 32.

⁵⁹Enco Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Cet. VI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 75.

pemahaman terhadap karakteristik peserta didik dengan kelainan fisik, sosial-emosional, dan intelektual yang membutuhkan penanganan khusus, serta memahami cara dan kesulitan belajar siswa.⁶⁰

Dari beberapa uraian para pakar tentang kompetensi pedagogik, dapat ditarik benang merahnya, bahwa kompetensi pedagogik menekankan pada kemampuan guru dalam memahami falsafah pendidikan, hakikat peserta didik dengan keragaman latar belakang dan potensi, kemampuan merumuskan dan mengimplementasikan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) di kelas ketika proses belajar mengajar (PBM) berlangsung, kemampuan menguasai strategi pembelajaran yang variatif, dan evaluasi hasil belajar yang terukur dan terstruktur, sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai dengan baik.

b. Kompetensi Kepribadian

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 Tahun 2005 pasal 28 ayat 3 butir a, yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Berkaitan dengan indikator kompetensi kepribadian, Rahman Getteng menambahkan dua hal dari uraian di atas, yaitu guru secara obyektif mengevaluasi kinerja diri sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.⁶¹

⁶⁰Munif Chatib, *loc. cit.*

⁶¹Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Beretika*, (Cet. VII; Yogyakarta: Grha Guru, 20120, h. 33.

Karakteristik yang dikehendaki dalam kompetensi kepribadian ini adalah sosok guru yang ideal dan memiliki kepribadian yang utuh, bukan *split personality* (kepribadian yang terbelah).

Sedangkan Wibowo dan Hamrin menguraikan indikator kompetensi kepribadian guru secara menyeluruh dan dapat dideskripsikan melalui tabel berikut ini.⁶²

No.	Kepribadian Guru	Indikator
1.	Mantap dan stabil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menaati perundang-undangan dan ketentuan lainnya. 2. Menunjukkan perilaku disiplin. 3. Bertindak sesuai norma sosial dengan ciri: (a) bertutur kata secara santun; (b) berpenampilan (fisik) secara sopan, dan (c) berperilaku santun. 4. Bangga sebagai pendidik, yang ditandai dengan: (a) menunjukkan komitmen terhadap tugas sebagai pendidik, dan (b) menjaga kode etik profesi pendidik. 5. Memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai norma yang berlaku.
2.	Dewasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dengan ciri: (a) melaksanakan tugas secara mandiri; (b)

⁶²Agus Wibowo dan Hamrin, *op. cit.*, h. 114-116.

		<p>mengambil keputusan secara mandiri, dan (c) menilai diri sendiri (refleksi diri).</p> <p>2. Memiliki etos kerja sebagai pendidik dengan ciri: (a) bekerja keras; (b) melaksanakan tugas secara bertanggung jawab, dan (c) mengembangkan diri secara terus menerus sebagai pendidik.</p>
3.	Arif	<p>1. Menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik.</p> <p>2. Bertindak atas dasar kemanfaatan sekolah.</p> <p>3. Bertindak atas dasar kemanfaatan masyarakat.</p> <p>4. Menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak dengan ciri menerima kritik dan saran yang konstruktif, serta menempatkan diri secara proporsional.</p>
4.	Akhlak Mulia	<p>1. Bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong).</p> <p>2. Memiliki perilaku yang dapat diteladani peserta didik, baik berupa tutur kata yang santun dan perilaku (tindakan) terpuji.</p>
5.	Berwibawa	<p>1. Mengemukakan pendapat yang berimplikasi positif terhadap peserta didik dan menunjukkan tindakan yang berpengaruh positif bagi peserta didik.</p> <p>2. Memiliki perilaku yang disegani, dengan ciri berperilaku yang dihormati oleh peserta didik, berperilaku yang dihormati</p>

		sejawat, dan berperilaku yang dihormati oleh masyarakat.
--	--	--

Tabel: 1 Disimplikasi oleh penulis

Dari uraian karakteristik kompetensi kepribadian guru tersebut, dan berbagai indikatornya, mengandung tuntutan implementasi yang menyeluruh dan hanya dapat direalisasikan apabila guru memiliki wawasan dan kompetensi keagamaan. Sebab, nilai-nilai luhur yang akan membentuk kepribadian yang baik bersumber dari agama.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sukro Muhab (Direktur PPIPTEK-KEMENRISTEK dan Ketua JSIT Pusat), bahwa mustahil pendidikan karakter akan terwujud bagi peserta didik apabila tidak dibarengi dengan penumbuhan kompetensi keagamaan yang diawali oleh para guru.⁶³ Oleh karena itu, guru harus mensinergiskan pengetahuannya dengan wawasan agama yang diyakininya, guna membentuk kepribadiannya, bukan terbawa oleh arus sekularisasi ilmu pengetahuan.

c. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Dalam Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) menyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

⁶³Sukro Muhab, "Konsep Pendidikan Sekolah Islam Terpadu (SIT)", dalam acara Workshop Guru JSIT Sulawesi Selatan, tanggal 1-2 Nopember 2013 di Makassar.

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Profesionalisme guru tercermin dari penguasaan materi pembelajaran dari mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan prinsip profesionalitas, dan kemampuannya secara strategis dan metodologis ketika melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Sebab, penguasaan materi pembelajaran yang luas dan mendalam tanpa dibarengi dengan model atau strategi pembelajaran yang tepat (sesuai dengan karakteristik peserta didik), tidak akan menghasilkan daya serap yang optimal dari peserta didik.

Oleh karena itu, menurut Munif Chatib, proses belajar mengajar (PBM) akan berhasil apabila strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru sudah sesuai dengan gaya belajar peserta didik.⁶⁴ Lebih lanjut Munif Chatib menjelaskan bahwa, guru yang profesional adalah guru yang berperan sebagai fasilitator dan katalisator bagi peserta didik dalam proses belajar mengajar.⁶⁵ Maksudnya, guru yang profesional, ketika melaksanakan proses belajar mengajar (PBM) mampu memfasilitasi, memotivasi, dan memberi partisipasi yang luas kepada peserta didik untuk belajar mandiri tentang apa yang dipelajari.

⁶⁴ Munif Chatib, *op. cit.*, h. 33.

⁶⁵ Munif Chatib, nara sumber dalam acara Seminar Nasional Pendidikan dan Workshop “Penerapan Strategi Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligence”, *Wawancara*, Palopo, tanggal 12 Januari 2014.

Untuk memahami gaya belajar peserta didik, guru yang profesional terlebih dahulu harus melakukan identifikasi atau pemetaan terhadap gaya belajar peserta didik. Di mana dalam klasifikasi J. Diana Connell, seperti yang dikutip Yaumi, membagi gaya belajar peserta didik ke dalam tiga bagian, yakni: (1) *visual learners*; (2) *auditory learners*; (3) *kinesthetic learners*.⁶⁶ Pertama, peserta didik visual, yang daya serapnya paling baik melalui penglihatan. Kedua, peserta didik auditori, yang daya serapnya paling baik melalui pendengaran. Ketiga, peserta didik kinestetik, yang daya serapnya paling baik melalui aktifitas fisik (gerak).

Menurut Yaumi, tidak mudah menentukan gaya belajar peserta didik (seorang siswa), apakah ia tergolong bergaya belajar visual, auditori, atau kinestetik.⁶⁷ Akan tetapi untuk mengidentifikasinya dapat dilakukan melalui angket yang berisi beberapa pertanyaan-pertanyaan sederhana menyangkut respons peserta didik terhadap kondisi-kondisi tertentu dalam kehidupan sehari-hari.

Guru yang profesional ketika akan memulai pembelajaran tahap awal di kelas, terlebih dahulu harus mengidentifikasi gaya belajar peserta didik yang akan dihadapinya, agar dalam pembelajaran selanjutnya mampu mengadaptasikan model dan strategi pembelajaran yang akan diterapkannya, sehingga tidak monoton dan menimbulkan kejenuhan bagi sebagian peserta didik.

⁶⁶ Muhammad Yaumi dalam Nurdin Ibrahim dan Darlan Sidik (ed.), *Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013), h. 125.

⁶⁷ *Ibid.*, h. 227.

Sebab bisa jadi, salah satu penyebab kemalasan atau kejenuhan peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar (*bored in study*) di kelas adalah strategi mengajar guru yang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa.

Berikut ini contoh angket gaya belajar yang dikemukakan Yaumi, hasil modifikasi dari J. Diana Connell, untuk diisi oleh peserta didik yang diberi judul “Bagaimana Anda Belajar dengan Baik: Angket Gaya Belajar Anak,” terdiri atas sepuluh nomor untuk mengintegrasikan tiga gaya belajar tersebut.⁶⁸

1. Bagaimana kebiasaan Anda dalam belajar sesuatu yang baru?
 - a. Dengan mendengarkan yang diceritakan guru.
 - b. Dengan melihat guru melakukan sesuatu.
 - c. Dengan melakukan sendiri apa yang dipelajari.
2. Apa yang biasa Anda lakukan di dalam rumah pada waktu senggang?
 - a. Membaca buku, komik, majalah, atau surat kabar yang lucu.
 - b. Menggambar, mewarnai, mengecet, bermain *game*, menata ruang, dll.
 - c. Menari atau melakukan pekerjaan fisik lainnya.
3. Apa yang biasa Anda lakukan pada akhir pekan?
 - a. Berbicara ditelepon, HP, atau *chatting* bersama kawan.
 - b. Bermain musik, melakukan kerja seni, atau mendengarkan musik.
 - c. Berolahraga.
4. Bagaimana cara terbaik bagi Anda dalam mengingat nomor telepon?
 - a. Menyebut angka berkali-kali sambil memencet tombolnya.

⁶⁸*Ibid.*, h. 128-129.

- b. Berusaha membayangkan nomornya.
 - c. Menulis nomornya (walaupun hanya di udara).
5. Apa yang anda perhatikan lebih banyak ketika menonton film?
 - a. Apa saja yang dikatakan seorang pemeran utama kepada yang lainnya.
 - b. Pakaian yang digunakan, pemandangan, dan hal-hal yang spasial di sekitarnya.
 - c. Semua adegan yang membuat saya mersa bahagia, takut, atau marah.
6. Ketika anda membaca buku cerita, apa yang paling diperhatikan?
 - a. Saya berpikir tentang makna kata-katanya.
 - b. Saya membayangkan semua yang dibaca.
 - c. Saya merasakan apa yang sedang pemeran rasakan.
7. Bagaimana Anda menceritakan kepada seseorang tentang binatang yang luar biasayang pernah Anda lihat?
 - a. Menjelaskan dengan kata-kata.
 - b. Menggambar foto binatang itu (di atas kertas atau di mpapan tulis).
 - c. Menggunakan anggota tubuh saya untuk meniru binatang itu.
8. Saya baru memahami sesuatu itu bagus sekali setelah ...
 - a. Memikirkan barang itu.
 - b. Melihatnya.
 - c. Mencobanya.
9. Salah satu kebiasaan saya untuk menghabiskan waktu adalah ...
 - a. Mendengarkan musik.

- b. Bermain *video game* pada komputer/laptop.
- c. Pergi berbelanja, jalan-jalan, atau mengerjakan sesuatu.

10. Ketika saya bertemu dengan orang baru, saya biasa mengingat ...

- a. Sesuatu yang dikatakan.
- b. Pakaian yang digunakan (penampilannya).
- c. Bagaimana dia bertindak atau berbuat.

Jumlahkan skor dari masing-masing kategori dan tulislah skor Anda di bawah.

----- Jawaban a untuk gaya belajar auditori.

----- Jawaban b untuk gaya belajar visual.

----- Jawaban c untuk gaya belajar kinestetik.

Banyak orang belajar dengan suatu cara yang paling kuat, sebagiannya memiliki dua cara yang sama kuatnya, dan yang lainnya lagi memiliki ketiga cara tersebut sama kuatnya. Yang manakah cara belajar yang paling kuat untuk anda?

(Contoh: Angket Gaya Belajar)

Dengan memberikan angket seperti di atas, dalam jangka waktu 5-10 menit, seorang guru sudah dapat mengetahui gambaran umum gaya belajar peserta didik yang akan diajar di dalam kelas.

- d. Kompetensi Sosial

Guru adalah makhluk sosial, yang dalam kehidupannya tidak bisa lepas dari interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar sekolah. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kompetensi sosial yang memadai, terutama dalam hal yang berkorelasi dengan pendidikan.

Dalam Standar Nasional Pendidikan dan penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 28 ayat (3) butir d, yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat sekitar.

Lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2008 mengenai kompetensi sosial, meliputi; 1) berkomunikasi lisan, tulis dan/atau isyarat secara santun; 2) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; 3) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik; 4) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan 5) menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Menurut Mulyasa, kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk:

- 1) Berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat.
- 2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.

- 3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik; dan
- 4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.⁶⁹

Sedangkan menurut Suharsaputra, kompetensi sosial akan terwujud apabila guru memiliki kematangan sosial (*social maturity*) dan kecerdasan sosial (*social intellegence*).⁷⁰ Kematangan sosial merupakan kemampuan untuk memahami hakikat lingkungan sosial di mana seseorang hidup, dan kecerdasan sosial merupakan kecerdasan interaktif, di mana seseorang dapat mengawali interaksi dan komunikasi sosial secara tepat, dan dapat merespon apa yang terjadi di lingkungan tempatnya berada.

Kecerdasan sosial yang terasah dengan baik akan melahirkan apa yang disebut dengan *soft skills*, yaitu keterampilan dan kecakapan hidup, baik untuk diri sendiri, berkelompok, atau bermasyarakat, serta dengan Sang Pencipta.⁷¹ *Soft Skills* merupakan kecerdasan lunak yang tidak berbentuk di luar kemampuan teknis dan akademik.

Menurut Wibowo dan Hamrin, *Soft Skills* merupakan keterampilan seseorang yang berhubungan dengan orang lain (*interpersonal skills*), dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri (*intrapersonal skills*), yang mampu mengembangkan unjuk

⁶⁹Encok Mulyasa, *op. cit.*, h. 173.

⁷⁰Uhar Suharsaputra, *Menjadi Guru Berkarakter*, dalam Nurul Falah (ed.), (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 85.

⁷¹Elfindri dkk., dalam Fitri Rasmita dan Revida Engel Bertha (ed.), *Soft Skill Untuk Pendidik*, (Cet. II; t.t. : Baduose Media, 2011), h. 67.

kerja secara maksimal.⁷² Dalam kaitannya dengan kompetensi guru, maka kompetensi kepribadian merupakan realisasi dari *intrapersonal skills*, dan kompetensi sosial merupakan realisasi dari *interpersonal skills*.

Perwujudan *soft skills* sebagai bagian dari kompetensi sosial bagi seorang guru dalam dunia pendidikan sangat penting, mengingat adanya realitas anomali (sesuatu yang ganjil dari yang seharusnya terjadi), terkadang banyak ditemukan guru yang secara akademik bagus, bahkan alumnus dari LPTK yang terkenal, tetapi ketika mengajar ia kurang mampu membawa kepada suasana pembelajaran. Sehingga, suasana pembelajaran menjadi kurang menyenangkan bagi peserta didik, hal ini disebabkan karena kurangnya *soft skills* dalam dirinya.

Demikian pula sebaliknya, ada guru yang secara akademik biasa-biasa saja dan ia alumnus dari LPTK yang biasa-biasa pula, tetapi ketika mengajar ia mampu membawa peserta didik ke dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga tidak menimbulkan kejenuhan. Hal ini disebabkan karena ia telah memiliki *soft skills* dalam dirinya.

Jadi, kompetensi sosial guru harus mengintegrasikan *soft skills* yang meliputi *interpersonal skills* (keterampilan yang berhubungan dengan orang lain; peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat sekitar) dan *intrapersonal skills* (keterampilan dalam mengatur diri sendiri; kesadaran diri, kontrol diri, pembawaan, manajemen emosi dan konsistensi). Secara sederhana dapat dideskripsikan sebagai berikut:

⁷²Agus Wibowo dan Hamrin, *op. cit.*, h. 134.



Tabel 2: *Integrasi Soft Skills* (modifikasi penulis)

C. Konsekuensi Sertifikasi Guru

Secara umum, program sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanah UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, dan realisasi dari UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sertifikasi guru adalah sebuah upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu

pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

Secara terperinci, sertifikasi guru bertujuan untuk: 1. menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran; 2. meningkatkan proses dan mutu pendidikan; 3. meningkatkan martabat guru; dan 4. meningkatkan profesionalisme.⁷³ Dari tujuan ini, terkandung konsekuensi yang harus diterima sekaligus diimban oleh para guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi oleh pemerintah melalui berbagai LPTK yang telah ditunjuk menjadi penyelenggara PLPG dan PPG.

Konsekuensi yang dimaksud adalah kualitas pendidikan yang meningkat dan profesionalisme guru selaku tenaga pengajar sekaligus pendidik. Kedua hal inilah yang harus ditingkatkan secara kontinu, tidak terbatas pada pemberian sertifikat pendidik pasca PLPG atau PPG.

Di samping menimbulkan konsekuensi, sertifikasi juga memberi manfaat kepada para guru dan masyarakat. Adapun manfaat dari sertifikasi guru di antaranya adalah: 1. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru, 2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional, dan 3. Meningkatkan kesejahteraan guru.⁷⁴

⁷³Bedjo Sujanto, *op. cit.*, h. 9.

⁷⁴*Ibid.*, h. 10-11.

Jika dipahami secara utuh, sertifikasi guru mengandung hak dan kewajiban. Di antara hak guru, seperti termaktub dalam UU RI. No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 16 ayat 2 adalah memperoleh tunjangan profesi setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Tunjangan profesi ini membawa implikasi kepada peningkatan kesejahteraan guru secara finansial, dan hal ini menjadi kebutuhan yang mendasar, seperti yang dikemukakan oleh Anwar Arifin, bahwa tunjangan profesi itu diperlukan sebagai syarat mutlak sebuah profesi agar penyandang profesi dapat hidup layak dan memadai, apalagi hingga saat ini guru dan dosen masih tergolong kelompok yang berpenghasilan rendah yang harus dibantu meningkatkan kesejahteraan melalui undang-undang.⁷⁵ Namun pemanfaatannya mesti harus proporsional antara kebutuhan domestik kerumahtanggaan dan kebutuhan penunjang keprofesionalan, agar guru tidak terjebak pada pragmatisme dan mengabaikan tuntutan profesionalisme.

Secara realitas, sejak berlangsungnya proses sertifikasi guru mulai tahun 2007 hingga saat ini, masih banyak guru yang belum memaksimalkan pemanfaatan tunjangan sertifikasi yang mereka terima untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme, mereka terkesan berada pada zona nyaman (*comfort zone*). Padahal

⁷⁵Anwar Arifin dalam *Dialog* Undang Undang Guru dan Dosen di Universitas Negeri Makassar (UNM) Tgl 01 April 2006.

di samping ada hak, guru juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, yaitu:

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.⁷⁶

Merujuk kepada pasal 20 ayat a UUGD di atas, konsekuensi yang harus dijalankan oleh guru adalah meningkatkan dan mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni. Hal ini mengindikasikan tuntutan adaptasi kompetensi guru secara akseleratif dengan perkembangan IPTEK.

Akan tetapi, apabila dikomparasikan antara masa pra-sertifikasi dan pasca-sertifikasi, maka terlihat ada perbedaan yang menonjol dari semangat partisipasi guru

⁷⁶ Yudha Pandu (ed.), *op. cit.*, h. 9.

dalam mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan pelatihan, seminar dan *workshop* pendidikan. Sebelum masa sertifikasi, antusiasme kaum guru dalam kegiatan-kegiatan tersebut sangat meningkat, namun pasca-sertifikasi terjadi penurunan yang disebabkan oleh perasaan nyaman dengan status profesional dan sertifikat pendidik yang mereka terima.

Akibatnya, tidak sedikit guru yang kembali kepada pola pembelajaran yang konvensional karena merasa tidak diawasi lagi, sehingga kinerja mereka tidak jauh berubah. Kondisi seperti ini pernah dikemukakan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara puncak peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-66 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Sentul International Convention Center, Citeureup, Jawa Barat, Rabu (30/11/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan sambutan, di dalam sambutannya presiden menyampaikan setidaknya ada banyak kemajuan dicapai dalam dunia pendidikan, tetapi masih ada pula yang perlu dikoreksi lagi, seperti kinerja guru yang telah lulus sertifikasi belum banyak berubah.⁷⁷

Sekaitan dengan peningkatan mutu guru melalui pendidikan profesi, Sunaryo Kartadinata menyatakan: *"...Educational academic competence is the essence of the teacher competence as the foundation in developing the professional competence*

⁷⁷<http://soalpendidikan.blogspot.com/2011/11/kinerja-guru-sertifikasi-harus-berubah.html>, *Kinerja Guru Sertifikasi Harus Berubah*. Diakses di Palopo tanggal 5 Januari 2014

through the education for teacher profession”⁷⁸ Artinya, kompetensi akademik merupakan esensi bagi kompetensi guru sebagai fondasi dalam pengembangan kompetensi profesional melalui pendidikan profesi guru.

Oleh karena itu, peningkatan dan pengembangan kualitas kompetensi guru tidak boleh berhenti pada proses sertifikasi semata, namun harus dilakukan evaluasi secara kontinu oleh supervisor (pengawas) yang telah diberi kewenangan oleh dinas pendidikan setempat. Sehingga, guru yang telah mengikuti proses sertifikasi senantiasa berbenah diri, baik dalam konteks peningkatan kompetensi paedagogik maupun kompetensi profesional.



IAIN PALOPO

⁷⁸Sunaryo Kartadinata, “Strategies In Improving Teacher Quality In Indonesia” dalam http://file.upi.edu/Direktori/FIP/Jur._Psikologi_Pendidikan_dan_Bimbingan_Sunaryo_Kartadinata/Improving_Teacher_Quality.pdf /195003211974121-

BAB III

PROFESIONALISME GURU DALAM MENGHADAPI UJIAN NASIONAL

A. Sikap Guru Dalam Menghadapi Ujian Nasional

Secara yuridis, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) memiliki beberapa landasan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 58 ayat (2): “Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan”.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:
 - a. Pasal 63 ayat (1): Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - 1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
 - 2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
 - 3) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
 - b. Pasal 66 ayat (1): Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional.

- c. Pasal 66 ayat (2): Ujian Nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
- d. Pasal 66 ayat (3): Ujian Nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.
- e. Pasal 68: Hasil Ujian Nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:
 - 1) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
 - 2) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
 - 3) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
 - 4) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam setiap tahun pelaksanaannya, Ujian Nasional selalu melahirkan kontroversi dan menyisakan masalah, khususnya bagi kaum guru dan peserta didiknya, sehingga menimbulkan beragam respon atau reaksi yang beragam. Dari kalangan guru muncul reaksi sebagai berikut:

Pertama, ada sebahagian guru yang menginginkan Ujian Nasional dihapuskan, karena dianggap tidak sesuai dengan hakikat dan proses pendidikan yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Sementara Ujian Nasional, hanya mengukur kemampuan kognitif peserta didik dari beberapa mata pelajaran. Sikap ini banyak pula

disuarakan dari berbagai kalangan, seperti para pemerhati pendidikan, LSM, akademisi dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.⁷⁹

Tuntutan penghapusan Ujian Nasional ini tidak sepenuhnya salah, mengingat Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang termaktub di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2009, pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa, Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketentuan ini sangat jelas mengatur tiga ranah dalam evaluasi pendidikan yakni kognitif, afektif dan psikomotorik. Jadi, kalau yang menjadi parameter kelulusan peserta didik hanyalah hasil Ujian Nasional, maka tidaklah cukup merepresentasikan seluruh proses pendidikan yang telah diikuti oleh peserta didik.

Tuntutan penghapusan Ujian Nasional secara keseluruhan belum berhasil, namun sebagiannya terkabulkan, karena pada tahun ajaran 2013/2014 Ujian Nasional untuk tingkat Sekolah Dasar atau sederajat telah dihapuskan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Mei 2013 lalu.⁸⁰

⁷⁹DPD RI dari Provinsi Sulawesi Selatan, Aziz Kahar Muzdakkar yang pernah menjabat sebagai Ketua Tim Panitia Khusus Pendidikan DPD RI, menyatakan bahwa, pansus pendidikan sudah banyak mendatangkan pakar dan dari berbagai argumen 90 persen diantaranya menginginkan ujian nasional dihapus. Dikutip dari <http://setetes-harapan.blogspot.com/2009/06/dpd-ri-usulkan-penghapusan-ujian.html>. *DPD RI Usulkan Penghapusan Ujian Nasional*. Diakses pada tanggal 5 Januari 2014.

⁸⁰[Http://pautunasislam.blogspot.com/2013/05/penghapusan-ujian-nasional-sd-tahun.html](http://pautunasislam.blogspot.com/2013/05/penghapusan-ujian-nasional-sd-tahun.html). *Penghapusan Ujian Nasional*. Diakses pada tanggal 6 Januari 2014.

Dalam Pasal 67 Ayat (1a) PP No. 32 Tahun 2013 disebutkan bahwa Ujian Nasional untuk satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar sebagaimana dimaksud, dikecualikan untuk SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat. Perubahan ini merupakan sebuah langkah awal yang tepat untuk menghindarkan ketidakjujuran atau praktik curang dalam bentuk contek massal saat ujian nasional, bagi peserta didik usia Sekolah Dasar atau sederajat yang masih luguh dan polos.

Langkah pemerintah dalam hal ini Kemendikbud yang menghapus Ujian Nasional bagi peserta didik SD atau sederajat, dinilai sudah bagus oleh Prof.Dr.M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). Ia menegaskan bahwa, “Kalau di SD sudah dihakimi dengan Ujian Nasional, saya khawatir program wajib belajar sembilan tahun terganggu.”⁸¹

Lebih lanjut ia menyatakan, solusinya untuk menggantikan Ujian Nasional adalah memaksimalkan ujian sekolah yang bertujuan memperbaiki kondisi dan pembelajaran di sekolah. Ujian sekolah dalam arti bukan dalam bentuk ujian serupa Ujian Nasional, melainkan menyelenggarakan ujian sekolah sendiri yang hasilnya menjelaskan kondisi peserta didik.⁸²

Kedua, ada sebahagian guru yang menghendaki Ujian Nasional tetap dilaksanakan setiap tahunnya, tetapi tidak dijadikan sebagai penentu kelulusan peserta didik, namun hanya sebagai evaluasi peningkatan mutu. Tuntutan ini

⁸¹[Http://magister-pendidikan.blogspot.com/2013/02/penghapusan-un-tingkat-sd-dinilai-tepat.html](http://magister-pendidikan.blogspot.com/2013/02/penghapusan-un-tingkat-sd-dinilai-tepat.html). Penghapusan Un Tingkat SD Dinilai Tepat. Diakses pada tanggal 10 Januari 2014.

⁸²*Ibid.*

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 68, khususnya ayat 3 yang menyebutkan bahwa, Ujian Nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan. Ketentuan ini berlaku untuk level SMA/SMK/MA atau sederajat.

Salah satu pertimbangan dari kelompok ini adalah realitas sekolah di berbagai daerah di Indonesia yang memiliki SDM dan sarana yang berbeda-beda, meskipun secara kurikulum nasional, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran telah ditetapkan secara sentralisasi. Akan tetapi, dalam menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap mata pelajaran merupakan otonomi setiap sekolah sesuai daya dukung (sarana dan prasarana) dan *intake* peserta didik.

Kondisi ini menjadi permasalahan Ujian Nasional yang sesungguhnya, di mana terjadi ketidakadilan (kesenjangan) antara sekolah-sekolah di perkotaan yang telah maju dengan *intake* peserta didik yang memadai dan sekolah-sekolah di pedesaan yang daya dukungnya kurang memadai dan *intake* peserta didik yang masih minim.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah sebagai penentu kebijakan (*decision maker*) harus lebih arif memberi pertimbangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional, agar tidak terjebak dengan persentase kelulusan peserta didik yang mencapai di atas 90 persen. Padahal, persentase tersebut tidak serta merta mengindikasikan kesuksesan

pemerintah dalam bidang pendidikan.⁸³ Tingginya persentase kelulusan peserta didik dalam Ujian Nasional tidak berbanding lurus dengan kualitas intelektual mereka, karena banyak terjadi ketidakjujuran, seperti kebocoran soal dan budaya contek massal demi mempertahankan citra sekolah. Kondisi inilah yang merusak citra pendidikan di Indonesia.

Tuntutan meninjau kembali Ujian Nasional tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara lain, seperti di China, professor Yong Zhao, pakar bidang pendidikan di Michigan State University, dalam artikelnya “China and the Whole Child” yang dimuat dalam majalah *Education Leadership* (Mei 2007), mengulas tantangan-tantangan dalam dunia pendidikan yang dihadapi Cina. Menurut Yong Zhao, persoalan yang muncul dalam dunia pendidikan di negeri Tirai Bambu itu bersumber pada satu hal, yakni pemberlakuan sistem ujian yang distandarkan (*standardized testing*) secara nasional, yang kemudian menghasilkan praktik pendidikan yang berorientasi pada tes (*test-oriented education*).⁸⁴

Melengkapi temuan Yong Zhao di Cina serta hasil riset para ahli pendidikan AS, hasil studi yang dilakukan Iwan Syahril, seorang mahasiswa pascasarjana di Teachers College, Universitas Columbia pada tahun 2007 menyebutkan dampak-dampak buruk UAN di Indonesia terhadap siswa dan guru. Pertama, siswa menderita masalah psikologis yang serius. Banyak siswa mengalami kecemasan saat ujian, dan

⁸³Ahmad Baedowi, “Derita UN” dalam Yanto Mustofa (Ed.), *Calak Edu 1 Esai-Esai Pendidikan 2008-2012*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012), h. 92.

⁸⁴<http://cpgmdepok.wordpress.com/2009/05/22/dampak-buruk-ujian-nasional-terhadap-siswa-guru-dan-sekolah/>. *Dampak Buruk Ujian Nasional Terhadap Siswa, Guru dan Sekolah*. Diakses pada tanggal 10 Januari 2014.

banyak yang merasa frustrasi karena gagal ujian. Kedua, guru kehilangan energi kreatif dalam mengajar.⁸⁵ Guru-guru merasa bahwa tidak ada gunanya merancang pengajaran kreatif dan inovatif kerana materi itu tidak akan diujikan, dan perasaan seperti ini akan mengesampingkan profesionalitas dalam mendidik.

B. Kecurangan Sistemik Dalam Ujian Nasional

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, pasal 68 ayat 1 disebutkan, ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan dan akuntabel. Ketentuan ini menekankan pada kejujuran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Ujian Nasional, baik oleh panitia penyelenggara, pengawas ujian, maupun peserta didik sebagai peserta.

Akan tetapi, dalam realitasnya dari tahun ke tahun, pelaksanaan Ujian Nasional selalu menuai kritikan tajam karena adanya kecurangan (ketidakjujuran) yang terstruktur, sistemik dan massal. Fenomena ini ibarat praktik *money politic* dalam pemilihan umum (pemilu), pemilihan kepala daerah (pemekarda), atau pemilihan legislatif (pileg) di Indonesia.

Kecurangan dalam Ujian Nasional sering terjadi tetapi tidak nampak, hanya beberapa kasus di daerah tertentu saja yang terpublikasi oleh media massa. Misalnya, kecurangan Ujian Nasional tahun 2007 di beberapa SMA/SMK di Medan yang

⁸⁵ *Ibid.*

dilaporkan oleh Komunitas Air Mata Guru.⁸⁶ Apa yang dilakukan oleh Komunitas Air Mata Guru tersebut adalah bentuk keprihatinan terhadap kecurangan Ujian Nasional yang merusak citra pendidikan, citra guru dan karakter peserta didik.

Perilaku kecurangan dalam Ujian Nasional ini terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia, hanya saja, sekali lagi, tidak terekspos oleh media karena terstruktur, sistemik dan massal, serta sedikit dari kalangan pemerhati pendidikan atau kaum guru yang berkenan memberikan laporan, disebabkan takut diintimidasi oleh pimpinan dan dikucilkan karena dianggap tidak kooperatif dalam membantu kelulusan peserta didik.

Dari hasil sebuah survei *online* yang dilakukan oleh Pusat Psikologi Terapan Jurusan Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) atas pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2004-2013, ditemukan bahwa kecurangan Ujian Nasional terjadi secara massal lewat aksi mencontek, serta melibatkan peran tim sukses yang terdiri dari guru, kepala sekolah, dan pengawas.⁸⁷ Inilah yang disebut dengan kecurangan yang sistemik dan terstruktur, karena kepala daerah menginstruksikan kepada kepala dinas pendidikan untuk mengamankan persentase kelulusan di atas 90 persen, selanjutnya kepala sekolah memberikan penekanan kepada para guru untuk membantu kelulusan peserta didik.

⁸⁶Laporan Lengkap Kecurangan UN 2007 oleh Komunitas Air Mata Guru, dalam <http://airmataguru.blogspot.com/2007/08/laporan-lengkap-kecurangan-un-2007.html>

⁸⁷Suara Pembaruan, *Survei UPI: Kecurangan UN Libatkan Guru dan Kepala Sekolah*, Rabu, 2 Oktober 2013.

Survei yang dilakukan oleh UPI, berasal dari responden sekolah negeri dan swasta, dengan persentase 77% responden dari sekolah negeri dan 20% dari sekolah swasta. Hasilnya, 75% responden mengaku pernah menyaksikan kecurangan dalam Ujian Nasional. Jenis kecurangan terbanyak yang diakui adalah mencontek massal lewat pesan singkat (sms), grup *chat*, kertas contekan, atau kode bahasa tubuh. Ada pula modus jual beli bocoran soal dan peran dari tim sukses (guru, sekolah, pengawas) atau pihak lain (bimbingan belajar dan joki). Hanya 3% responden yang melaporkan terjadinya kecurangan.⁸⁸

Dari deskripsi kecurangan dalam Ujian Nasional tersebut, ada dua hal yang harus dianalisa demi perbaikan citra dunia pendidikan ke depan, yaitu: faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam Ujian Nasional dan dampaknya terhadap guru dan peserta didik.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kecurangan dalam Ujian Nasional

Dalam kaca mata pendidikan, secara nurani, pihak-pihak yang terlibat dalam kecurangan Ujian Nasional tidak menghendaki hal itu terjadi, namun ada faktor-faktor eksternal yang memicu terjadinya kecurangan, yaitu: 1) penekanan yang berlebihan pada hasil, bukan pada proses pembelajaran. Akibatnya, hasil menjadi tujuan utama. Ketika hasil dianggap lebih penting daripada proses, segala cara pun dihalalkan demi memperoleh nilai tinggi; 2) hasil ujian nasional berdampak pada reputasi dan nama baik sekolah, termasuk di dalamnya kepala sekolah dan para guru,

⁸⁸ *Ibid.*

di mata masyarakat umum;⁸⁹ dan 3) hasil ujian nasional menjadi penentu kelulusan dan acuan untuk masuk ke perguruan tinggi. Akibatnya, segala cara ditempuh untuk meraih persentase kelulusan yang setinggi-tingginya.

Namun bagi sekolah yang mengedepankan prestasi dan kualitas, serta karakter peserta didik, tidak terjebak dengan faktor-faktor yang bersifat kamufase di atas, seperti yang terjadi di tiga sekolah Sukma Bangsa di Aceh, saat pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2008. Seluruh *stake holdres* yang ada di sekolah itu sepakat untuk tidak melakukan kecurangan, termasuk peserta didik dan para orang tua. Hasilnya, dari total 116 peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional, tercatat hanya 22 orang yang lulus Ujian Nasional. Artinya, jika dipersentase hanya 22-24% saja memiliki angka kelulusan yang sesuai dengan standar Ujian Nasional. Sementara sekolah-sekolah lain di Aceh memiliki angka kelulusan rata-rat di atas 80%.⁹⁰

Dari perspektif kelulusan Ujian Nasional, alumni dari sekolah Sukma Bangsa di Aceh memiliki persentase yang rendah, tetapi fakta yang mengejutkan adalah ketika pengumuman SNMPTN, sekira 66% alumni sekolah Sukma Bangsa lulus ke PT seperti UGM, ITS, ITB, UIN, UNSYIAH, USU, IAIN Ar-Raniry. Sedangkan sekolah-sekolah lain di Aceh, rata-rata alumninya sekira 12% yang lulus ke PT.⁹¹

⁸⁹Benedictus Widi Nugroho, "Dampak Ujian Nasional Terhadap Siswa, Guru, dan Sekolah", Dipublikasikan di Majalah BASIS Edisi Juli-Agustus 2008.

⁹⁰Ahmad Baedowi, *op. cit.* h. 93.

⁹¹*Ibid.*

Komitmen seperti inilah yang harus dibangun dan dibudayakan di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta dengan melibatkan kepala sekolah, para guru dan peserta didik, serta orang tua peserta didik, agar karakter jujur lebih diprioritaskan dari pada memburu reputasi dan prestise sekolah.

Sebagai bukti konkrit telah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional, terdapat laporan yang pernah disampaikan oleh Komunitas Air Mata Guru (KAMG) pada tahun 2007 di Medan Sumatera Utara:⁹²

Dari kronologis yang dideskripsikan dalam laporan tersebut, modus operandi kecurangan seperti itu sudah lazim terjadi dari tahun ke tahun di berbagai daerah, hanya saja, praktik kecurangan tidak diberi sanksi secara hukum karena ada konsensus saling memahami dengan bahasa “menyelamatkan masa depan peserta didik.” Padahal, dampaknya sangat merusak citra profesionalisme guru dan karakter peserta didik.

Sebagian kalangan ada yang berpandangan, bahwa kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional dapat “dimaklumi” karena tingginya standar kelulusan yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni mencapai angka 5,5. Sementara sarana dan prasarana pendidikan yang ada di berbagai daerah di Indonesia sangat berbeda-beda.

⁹²Data laporan dikutip dari <http://airmataguru.blogspot.com/2007/08/laporan-lengkap-kecurangan-un-2007.html>. *Laporan Lengkap Kecurangan UN 2007*. Diakses pada tanggal 10 Januari 2014. Secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran.

Dalih seperti ini cukup rasional, tetapi tidak bisa dijadikan justifikasi sepenuhnya, karena dapat mengabaikan karakter kejujuran yang seharusnya dicontohkan bagi peserta didik dalam proses pendidikan.

2. Dampak Kecurangan Ujian Nasional Terhadap Guru dan Siswa

a. Dampak Terhadap Guru

Kecurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan Ujian Nasional memberi dampak negatif secara psikologi dan profesi terhadap kalangan guru. Secara psikologis akan melahirkan perasaan:

- 1) mengkhianati nurani dan idealisme sebagai pendidik;
- 2) mengkhianati komitmen intelektual;
- 3) merusak citra dan karakter guru; dan
- 4) merusak mentalitas peserta didik.

Sedangkan secara profesi keguruan, dampak negatif kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional ialah:

- 1) mengabaikan prinsip-prinsip profesionalitas;
- 2) melemahkan kreatifitas dan inovasi pembelajaran;
- 3) mengedepankan hasil dari pada proses pembelajaran; dan
- 4) memudarnya keteladanan.

b. Dampak Terhadap Peserta Didik

Di samping memberi dampak negatif terhadap guru, kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional juga memberi dampak negatif terhadap peserta didik, di antaranya:

- 1) lemahnya motivasi belajar peserta didik;⁹³
- 2) kurangnya sikap menghargai ilmu karena mengedepankan nilai;
- 3) kurangnya rasa hormat kepada guru karena pudarnya keteladanan; dan
- 4) berkembangnya tabiat ketidakjujuran pada diri peserta didik.

Dampak-dampak negatif tersebut yang harus dihilangkan dengan membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan ujian nasional secara obyektif dan jujur, sehingga pendidikan karakter yang dicita-citakan selama ini tidak kontra produktif dengan perilaku curang saat pelaksanaan ujian nasional.

3. Upaya Antisipatif Pemerintah Terhadap Kecurangan Ujian Nasional

Pemerintah melalui Kemendiknas (sekarang Kemendikbud) telah berupaya untuk menghilangkan atau meminimalisir perilaku kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional, dengan menetapkan bentuk soal Ujian Nasional ganjil-genap atau paket 22 dan paket 55. Akan tetapi, bentuk soal ini tidak mampu menghilangkan perilaku kecurangan pada saat pelaksanaan Ujian Nasional, sehingga pada tahun

⁹³Indikasinya dapat dilihat pada sebagian besar peserta didik, khususnya kelas IX pada jenjang SLTP atau sederajat, dan kelas XII pada jenjang SMA/SMK/MA atau sederajat. Mereka terkesan acuh tak acuh dalam mengikuti proses belajar mengajar (PBM) dan bimbingan belajar, karena mereka sudah menanamkan harapan bahwa akan ada Kunci Jawaban pada saat Ujian Nasional.

pelajaran 2011/2012 ditetapkan bentuk soal Ujian Nasional dengan varian lima (5) paket soal.⁹⁴

Bentuk soal lima (5) paket ini pun belum mampu meminimalisir praktik kecurangan dalam Ujian Nasional, sehingga pada tahun pelajaran 2012/2013 ditetapkan dua puluh (20) paket soal Ujian Nasional dalam satu ruang ujian dan menggunakan *barcode*. Namun realitasnya yang terjadi pada waktu pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2013 sangat amburadul mulai dari distribusi soal yang terhambat di berbagai daerah, sampai pada teknis pelaksanaan ujian yang tidak serentak, karena banyaknya sekolah yang belum mendapatkan naskah soal, dan harus menunggu *copy*-an naskah soal dari sekolah lain yang berada dalam satu rayon. Di sinilah celah yang membuka peluang terjadinya kebocoran soal yang dilakukan oleh pihak penyelenggara.

Di samping itu, secara teknis, upaya antisipatif pemerintah agar tidak terjadi kecurangan pada saat Ujian Nasional adalah dengan menerjunkan pengawas dari berbagai level, mulai dari pengawas tingkat provinsi, pengawas tingkat kabupaten/kota, hingga pengawas dari Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan, dalam upaya mencapai Ujian Nasional kredibel, Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional ditugaskan untuk memetakan hasil

⁹⁴Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0011/P/BSNP/XII/2011 tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK Tahun 2011/2012, Bab III tentang Bahan Ujian Nasional.

Ujian Nasional dan kejujuran menurut sekolah, provinsi, kota/kabupaten.⁹⁵ Dari hasil identifikasi itu, pada tahun 2010 menurut data Kemendinas, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta paling bersih (jujur) karena sedikit terjadi kecurangan, sebaliknya provinsi yang paling banyak terjadi kecurangan saat pelaksanaan Ujian Nasional adalah Gorontalo.⁹⁶

Dari fakta-fakta kecurangan pelaksanaan Ujian Nasional yang telah terjadi selama ini, semestinya dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan kemampuan tenaga pengajar (guru) dalam menderivasikan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional.

Demikian pula dengan perbedaan daya dukung (sarana dan prasarana) di setiap sekolah dan *intake* (daya serap) peserta didik, kedua hal ini saling mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Sarana dan prasarana yang memadai menjadi parameter dalam penentuan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap mata pelajaran, dan menjadi indikator peningkatan *intake* (daya serap) peserta didik di sebuah satuan pendidikan, dan tentu saja seluruh daya dukung itu menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya.

Jadi, apabila mengacu kepada ketersediaan daya dukung dan *intake* peserta didik yang berbeda-beda di setiap daerah, maka ketika hasil Ujian Nasional

⁹⁵Muh. Nuh, "Kecurangan Ujian Nasional Diidentifikasi", *Kompas.com*, 20 Januari 2010.

⁹⁶*Ibid.*

diumumkan, persentase kelulusan di sekolah-sekolah yang berada di daerah yang tertinggal dari segi sarana dan prasarana, sama atau lebih tinggi dari sekolah-sekolah di daerah yang maju secara fasilitas, tentu saja akan menimbulkan pertanyaan, apakah hasil itu obyektif atau tidak?

C. Tawaran Solutif Terhadap Permasalahan Ujian Nasional

Ujian Nasional perlu diadakan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengetahui daya pencapaian target dari standar nasional yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemerintah akan mengetahui daerah yang telah mampu atau belum mampu mencapai target, sehingga pemerintah bisa mengambil tindakan untuk meningkatkan pendidikan daerah tersebut.

Ujian Nasional dapat menjadi titik temu antara otoritas guru sebagai pelaku evaluasi pembelajaran dengan kewenangan pemerintah dalam mengendalikan mutu pendidikan nasional. Akan tetapi, realitas yang terjadi selama ini, pelaksanaan Ujian Nasional telah melenceng dari tujuan utamanya, karena berorientasi kepada persentase kelulusan dan reputasi institusi, bukan prestasi dan pengetahuan.

Oleh karena itu, untuk menjaga obyektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan Ujian Nasional dan demi tercapainya pendidikan karakter bagi peserta didik, maka solusi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Ujian Nasional tetap dilaksanakan tetapi penentuan lulus atau tidak lulus ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan dengan pertimbangan para guru. Karena guru lebih mengetahui kemampuan siswanya dan penilaiannya pun

tidak hanya psikomotor saja tetapi diikuti sertakan penilaian kognitif dan afektif. Kebijakan ini dipandang riskan (mengandung resiko) ketika ada peserta didik yang tidak lulus, dan melahirkan resistensi sosial dari orang tua peserta didik, atau masyarakat. Akan tetapi, jika disosialisasikan oleh pihak sekolah secara intensif dan persuasif, maka lambat laun masyarakat akan memahami dan dapat menerima dengan logis. Apatah lagi untuk saat ini (sejak tahun 2013), kriteria kelulusan peserta didik telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Pasal 6 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan:

- 1) Kriteria kelulusan peserta didik untuk Ujian Nasional (UN) SMP/Mts/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK/MAK, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan adalah:
 - a. NA setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan paling rendah 4,0 (empat koma nol); dan
 - b. rata-rata NA untuk semua mata pelajaran paling rendah 5,5 (lima koma lima).
- 2) NA merupakan gabungan Nilai S/M/PK dan Nilai UN dengan bobot 40% Nilai S/M/PK dan 60% Nilai UN.⁹⁷

Dari ketentuan tersebut, nilai sekolah memberi berkontribusi dalam membantu kelulusan peserta didik ketika Ujian Nasional, sehingga kepala sekolah dan guru tidak perlu lagi menjadi tim sukses Ujian Nasional dengan melakukan kecurangan, agar kemandirian peserta didik terbentuk.

⁹⁷Salinan Naskah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 97 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional.

2. Pemerintah hendaknya memperbaiki dan melengkapi fasilitas sekolah secara merata supaya kompetensi berjalan seimbang di berbagai daerah.
3. Membangun kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait, baik pemerintah daerah, dinas pendidikan, guru, maupun orang tua peserta didik dalam menyukseskan pendidikan, terutama pendidikan karakter.
4. Para guru yang mengampu mata pelajaran yang diujikan secara nasional, hendaknya dilatih secara berkesinambungan untuk menyusun soal-soal ulangan yang bobotnya mendekati kualitas soal-soal ujian nasional. Sehingga, peserta didik mampu melakukan penyesuaian.

Mata pelajaran Ujian Nasional tetap dipentingkan, tetapi pelajaran lain jangan diabaikan, seperti pendidikan agama kalau diabaikan tentunya peserta didik akan mudah stress dan frustasi karena terjebak dengan pendekatan intelektual (*intellectual approach*) saat menghadapi Ujian Nasional, padahal pendekatan spiritual (*spiritual approach*) sangat penting juga. Di sinilah nilai-nilai agama dibutuhkan untuk menstabilkan jiwa dan keimanan.

IAIN PALOPO

BAB IV

INTEGRASI PROFESIONALITAS DAN KARAKTER GURU DALAM PENDIDIKAN

A. Korelasi Antara Profesionalitas dan Karakter Guru

Dalam dunia pendidikan, profesionalitas dan karakter guru adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pekerjaan guru bukan sekedar mengajar atau mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi sekaligus mendidik. Ketika proses pembelajaran di kelas, maka profesionalitas yang memiliki peranan penting, dan ketika mendidik pada aspek sikap dan perilaku, maka karakter yang harus dikedepankan, karena di dalam karakter tercermin keteladanan.

Peningkatan profesionalitas guru telah dilakukan oleh pemerintah dan berlangsung secara kontinu melalui program sertifikasi guru, yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, yang dijabarkan ke dalam Permendiknas No. 18/2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, yang selanjutnya diperbarui dengan Permendiknas No. 10/2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

Akan tetapi, bermodalkan profesionalitas saja tidaklah cukup dalam mendidik generasi bangsa, karena saat ini dunia pendidikan Indonesia sedang mengalami krisis karakter disebabkan kurangnya keteladanan dari para pendidik. Sehingga tidaklah salah pernyataan yang pernah dikemukakan oleh H.A. Malik Fajar (mantan Mendiknas), seperti yang dikutip Muhaimin yang intinya bahwa: “pada saat ini di

dunia pendidikan kita masih kekurangan guru, kalau tenaga pengajar banyak, tetapi tenaga guru masih sangat langka. Ukuran kualitas Perguruan Tinggi bukan hanya dilihat dari berapa yang bergelar Doktor, tetapi berapa banyak guru di dalamnya”.⁹⁸ *Statement* ini mengandung kritikan yang cukup dalam bagi tenaga pengajar di setiap institusi pendidikan, agar memulihkan nilai-nilai keteladanan sebagai guru, bukan hanya mengedepankan profesionalitas dan intelektualitas.

Parameter profesionalitas guru telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 10 yang menyebutkan bahwa guru yang profesional memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Di samping profesional, kaum guru juga dituntut berkarakter, karena mereka akan menjadi model (contoh) bagi peserta didik yang diajar di sekolah. Oleh karena itu, wacana pendidikan karakter tidak boleh hanya diorientasikan dan ditekankan bagi peserta didik, tetapi terlebih dahulu dipahami dan dimiliki oleh setiap guru agar memberi implikasi yang kuat terhadap pembentukan kepribadian peseta didik.

Dalam konteks Indonesia, wacana pendidikan karakter dicetuskan pertama kali oleh Ratna Megawangi, alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) yang *concern* terhadap dunia pendidikan, anak, dan perempuan. Ia mengedepankan sembilan karakter yang harus dibangun yaitu; karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya,

⁹⁸Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*, (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 149.

kemandirian dan tanggung jawab, jujur/amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong/kerja sama, percaya diri dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, dan karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan.⁹⁹

Selanjutnya, istilah pendidikan karakter kembali menguat ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhammad Nuh dalam pidatonya pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2011 menekankan urgensi pendidikan karakter sebagai upaya pembangunan karakter bangsa (*nation character building*).¹⁰⁰

Sebagai *follow up* dari gagasan pendidikan karakter tersebut, maka pada tahun 2011 Kementerian Pendidikan Nasional menerbitkan buku pelatihan dan pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum Kemendiknas RI, yang mencakup 18 nilai-nilai pendidikan karakter dan harus disisipkan di seluruh tingkatan pendidikan di Indonesia.¹⁰¹ Nilai-nilai karakter inilah yang menginspirasi penyempurnaan kurikulum KTSP ke dalam kurikulum pendidikan 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang saat ini masih dalam tahap sosialisasi dan uji coba di berbagai daerah di Indonesia.

⁹⁹Ulil Amri Syafri, *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an*, (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Paersada, 2012), h. x.

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹Retno Listyarti, *Pendidikan Karakter Dalam Metode Aktif, Inovatif dan Kreatif*, (Cet. II; Jakarta: Esensi, 2012), h. 5.

Adapun ke-delapan belas nilai-nilai karakter tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:¹⁰²

Tabel 18 Nilai Karakter

No.	Nilai Karakter	Uraian
1.	Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2.	Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.
3.	Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya.
4.	Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh kepada berbagai ketyentuan dan peraturan.
5.	Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

¹⁰²*Ibid.* h. 5-8. Lihat pula Ulil Amri Syafri, *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an*, *op. cit.*, h. ix-xiii.

6.	Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki,
7.	Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8.	Demokratis	Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9.	Rasa Ingin Tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam dan meluas dari sesuatu yang dipeajarinya, dilihat dan didengar.
10.	Semangat Kebangsaan	Cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11.	Cinta Tanah Air	Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik dan bangsa.
12.	Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi

		masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain.
13.	Bersahabat/komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan senang berbicara, bergaul dan bekerja sama dengan orang lain.
14.	Cinta Damai	Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadirannya.
15.	Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16.	Peduli Lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu ingin berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17.	Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18.	Tanggung Jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap dirinya maupun orang lain

		dalam lingkungan sekitarnya.
--	--	------------------------------

Perwujudan 18 nilai-nilai karakter tersebut dalam diri peserta didik, secara formil, tentu saja menjadi tanggung jawab utama para guru di sekolah, yang diawali dengan sikap dan karakter para guru yang direfleksikan dalam tindakan dan perbuatan yang nyata. Sebab, bagaimana mau mengajari peserta didik tentang pendidikan karakter, sementara guru yang bersangkutan tidak memahami dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata?

Maka, untuk mewujudkan pendidikan karakter bagi peserta didik, sudah saatnya para guru merubah paradigma dan *mindset* mereka, dari sekedar memberikan teori pengetahuan pada ranah kognitif, menuju ke arah pemberian teladan dan praksis nyata.¹⁰³ Jadi, dalam konteks ini, perpaduan antara profesionalitas dan kompetensi kepribadian akan melahirkan kualitas personal seorang guru dalam mengajar dan mendidik.

Menurut Muhaimin, seorang guru wajib memiliki sifat-sifat mulia sebagai kode etik atas profesinya. Beberapa sifat mulia yang harus dimiliki yaitu; ikhlas dalam bekerja, menjaga diri dan kehormatan, menjadi teladan bagi peserta didik, satu kata antara ilmu dan perbuatan sehari-hari, sabar dalam mengajarkan ilmunya, dan tidak meremehkan mata pelajaran lainnya.¹⁰⁴

¹⁰³ Agus Wibowo dan Hamrin, *Menjadi Guru Berkarakter: Strategi Membangun Kompetensi dan Karakter Guru*, h. 47.

¹⁰⁴ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 115.

Dengan demikian, untuk menjadi guru yang ideal, maka yang dibutuhkan bukan sekedar peningkatan profesionalitas dengan beragam kompetensi yang ada di dalamnya, tetapi dibutuhkan pula nilai-nilai karakter dasar yang unggul, seperti, religius, sabar, ikhlas, jujur, disiplin, komitmen, adil dan bijaksana.

Untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai karakter dasar ini, dibutuhkan kompetensi keagamaan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Sama halnya dengan kompetensi, apabila diasah dan dilatih maka akan semakin meningkat, demikian pula halnya dengan sifat-sifat baik, harus dilatih agar menjadi kebiasaan. Perilaku baik yang dibiasakan, lambat laun akan menjadi karakter.¹⁰⁵

Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan, pengintegrasian profesionalitas dan karakter guru menjadi suatu kewajiban yang mutlak untuk diwujudkan demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan melahirkan *output-output* peserta didik yang berkepribadian utuh, bukan *split personality*.¹⁰⁶

B. Urgensi Keteladanan Dalam Pendidikan

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kepribadian guru akan menjadi teladan bagi peserta didik dan pengaruhnya sangat kuat dalam

¹⁰⁵Erie Sudewo, *Best Practice Character Building, Menuju Indonesia Lebih Baik*, (Cet. II; Jakarta: Republika, 2011), h. 50.

¹⁰⁶Maksudnya ialah peserta didik yang berkepribadian terbelah, di satu sisi memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, tetapi di sisi lain integritas moralnya rendah. Realitas inilah yang banyak terlihat dari *output-output* pendidikan di Indonesia, sehingga digagas kembali pendidikan karakter yang berbasis pada kurikulum integratif.

mempengaruhi pembentukan karakter mereka. Oleh karena itu, dalam konteks implementasi pendidikan karakter di Indonesia, realisasi nilai-nilai keteladanan menjadi suatu keharusan bagi para guru ketika menjalankan profesi mengajar dan mendidik.

1. Arti Keteladanan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah keteladanan berasal dari kata “teladan” yang berarti patut ditiru, baik untuk dicontoh. Sedangkan “keteladanan” berarti hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh.¹⁰⁷ Dalam kaitannya dengan profesi guru, keteladanan berarti segala segala hal, baik berupa perkataan, sikap, maupun perbuatan yang bersumber dari guru yang patut dicontoh atau ditiru oleh peserta didik.

Sedangkan dalam terminologi pendidikan Islam, keteladanan disebut dengan istilah *uswah* dan *qudwah*. Kata *uswah* mengacu kepada ayat-ayat al-Qur’an yang menerangkan tentang keteladanan yang baik dari Nabi Muhammad saw. dan Nabi Ibrahim as., dan diulangi sebanyak tiga kali dalam al-Qur’an yakni pada surat al-Ahzab /33: 21 dan surat al-Mumtahanah/60: 4 dan 6. Firman Allah swt.:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

¹⁰⁷Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 917.

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.¹⁰⁸

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ ۗ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ رَبَّنَا عَلِّمْنَا تَوْكَلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿١٠٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran) mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya: "Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah". (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau lah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkau lah kami bertaubat dan hanya kepada Engkau lah kami kembali."¹⁰⁹

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٠٩﴾

Terjemahnya:

¹⁰⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Hilal, 2010), h. 420.

¹⁰⁹*Ibid.*, h. 549.

Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang yang mengharap (pahala) Allah dan (keselamatan pada) Hari kemudian. Dan barangsiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dia-lah Yang Maha Kaya lagi terpuji.¹¹⁰

Adapun kata *qudwah*, yang dari kata *ق - د - و - ة* yang berarti *uswah*, yaitu ikutan (teladan). *Uswah* ini dapat dimaknai *uswah hasanah* dan *uswah sayyi'ah*. Maka dalam Islam sering digunakan istilah *qudwah hasanah* untuk menggambarkan keteladanan yang baik.¹¹¹ Konsepsi pendidikan Islam tentang keteladanan patut dijadikan acuan, karena merujuk kepada kepribadian Rasulullah saw. dan para sahabatnya dengan kualitas kepribadian yang integratif.

2. Pentingnya Keteladanan

Dalam konteks dinamika dunia pendidikan di Indonesia, keteladanan dalam pendidikan telah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara (Menteri Pengajaran dan Kebudayaan di era orde lama) dengan konsep *Ing Ngarso Sung Tulado, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani*. Hanya saja, konsep ini memudar akibat dari kebijakan pendidikan yang sekuler di masa orde baru, dengan orientasi intelektual yang mengabaikan pembentukan karakter. Selanjutnya, di era reformasi saat ini, keteladanan diaktualisasikan kembali sebagai bagian dari kompetensi kepribadian guru, seperti yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005, pasal 28 ayat 3 butir b.

¹¹⁰*Ibid.*, h. 550.

¹¹¹Ulil Amri Syafri, *op. cit.*, h. 142.

Menurut Mulyasa, pribadi guru sangat berperan dalam membentuk pribadi peserta didik, hal ini disebabkan karena manusia merupakan makhluk yang suka mencontoh, termasuk mencontoh gurunya dalam membentuk pribadinya.¹¹² Hal ini menunjukkan bahwa secara ekspresif sikap dan perbuatan guru akan mudah ditiru oleh peserta didik ketika proses pendidikan berlangsung. Lebih lanjut Mulyasa menegaskan, menjadi teladan merupakan bagian integral dari seorang guru, sehingga menjadi guru berarti menerima tanggung jawab untuk menjadi teladan.¹¹³

Keteladanan dari seorang lebih ampuh pengaruhnya terhadap perubahan sikap dan tingkah laku peserta didik, dibanding instruksi verbal seorang guru. Dalam sebuah pepatah Arab disebutkan:

فِعْلُ رَجُلٍ فِي أَلْفِ رَجُلٍ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ أَلْفِ رَجُلٍ فِي رَجُلٍ

Artinya: “Perbuatan satu orang di hadapan seribu orang lebih baik dibanding perkataan seribu orang di hadapan satu orang.”¹¹⁴

Di dalam al-Qur’an, Allah swt, mencela orang-orang yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan, firman Allah dalam QS. al-Shaf/61:2-3:

IAIN PALOPO

¹¹²Encok Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Cet. VI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 117.

¹¹³*Ibid.*, h. 128.

¹¹⁴Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2012), h. 47. Teks syair diubah dari transliterasi latin ke teks Arab oleh penulis.

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿١١٥﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿١١٦﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.¹¹⁵

Sekaitan dengan ayat di atas, sebuah syair Arab melukiskan hal yang sama dengan ungkapan: لَا تَنْهَىٰ عَنِ خُلُقٍ وَتَأْتِي مِثْلَهُ ، عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمٌ (“Jangan melarang

sesuatu sedangkan engkau melakukannya, aib besar jika engkau melakukannya.”)¹¹⁶

Demikian pula deskripsi hadis Rasulullah saw. tentang urgensi keteladanan dalam pendidikan, beliau bersabda:

مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيُنْسِي نَفْسَهُ كَمَثَلِ السَّرَّاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرِقُ نَفْسَهُ (رواه الطبراني عن جندب).¹¹⁷

Artinya:

Perumpamaan seorang guru yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, namun melupakan dirinya, seperti lilin yang menyinari manusia, namun membakar dirinya.

¹¹⁵*Ibid.*, h. 551.

¹¹⁶*Ibid.*, Teks syair diubah dari transliterasi latin ke teks Arab oleh penulis.

¹¹⁷Sayyid Ahmad Al-Hâsyimî, *Mukhtâru al-Ahâdis al-Nabawiyyah wa al-Hikam al-Muhammadiyah*, (Cet. XII; Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Thoha Putra, t.th.), h. 135.

Dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi saw., serta syair-syair Arab di atas, sangat jelas mendeskripsikan pentingnya keteladanan dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap peserta didik, sehingga menjadi sangat urgen bagi para guru untuk senantiasa mengedepankan contoh atau suri tauladan yang baik dalam proses belajar mengajar. Guru atau pendidik yang hanya mengandalkan konsep dan teori pengetahuan semata dalam mengajar, tanpa bersedia memberi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap dan tingkah laku, tidak bisa berharap banyak terhadap perubahan karakter peserta didiknya. Namun sebaliknya, bagi guru yang mengintegrasikan teori pengetahuan dan teladan yang baik, jauh lebih nampak keberhasilannya dalam mendidik.

3. Aspek-aspek Keteladanan Guru Bagi Peserta Didik

Berbicara tentang sikap dan perilaku yang baik tentu saja ruang lingkupnya sangat luas, namun dalam dunia pendidikan, ada beberapa aspek keteladanan yang harus dimiliki oleh guru untuk direalisasikan dan dicontoh oleh peserta didik, yaitu:

- a. Religius, yaitu ketaatan atau kepatuhan yang kuat dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya, sehingga guru mempunyai kekuatan ruhiyah yang mampu menstabilkan emosi dan jiwanya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Peran guru sebagai sosok yang religius sangat penting di abad 21 ini, mengingat kultur

masyarakat modern cenderung mengabaikan nilai-nilai keagamaan dan mengutamakan aspek duniawi.¹¹⁸

- b. Jujur, yaitu sikap mental yang selalu dapat dipercaya baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kejujuran guru akan menjadi kekuatan magnetik bagi peserta didik untuk menjadikannya sebagai model (teladan).
- c. Ikhlas, yaitu motivasi yang tulus dalam mengajar dan mendidik, sehingga orientasi kinerja guru bukan gaji atau tunjangan semata, tetapi berorientasi pula kepada tujuan eskatologis (akhirat) dengan ilmu yang bermanfaat. Keikhlasan lahir dari hati, dan sesuatu yang lahir dari hati akan mengena ke dalam hati. Seperti yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A. (Wakil Menteri Agama RI 2009-2014): مَا خَرَجَ مِنَ الْقَلْبِ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ (apa yang keluar dari hati akan sampai di hati).¹¹⁹
- d. Pembelajar, yaitu semangat cinta ilmu dan tidak merasa cukup atau puas dengan ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki. Guru harus selalu belajar sepanjang hidupnya, agar peserta didik dapat mencontoh kebiasaan positifnya tersebut, dan agar apa yang disampaikan kepada peserta didik di depan kelas bukan sesuatu yang usang, tetapi selalu *up date* (aktual).¹²⁰ Spirit belajar yang tinggi dari kalangan guru akan menjadi inspirasi bagi peserta didik menuntut

¹¹⁸Jejen Musfah, *op. cit.*, h. 51.

¹¹⁹Nasaruddin Umar, *Kuliah Umum Epistemologi Islam*, tanggal 29 Oktober 2013 di STAIN Palopo.

¹²⁰Jejen Musfah, *op.cit.*, h. 118.

ilmu pengetahuan, dan mereka akan memahami bahwa untuk memperoleh ilmu dibutuhkan pengorbanan, kesabaran, waktu dan biaya. Seperti yang dinyatakan dalam sebuah syair Arab yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib:

أَلَا لَنْ تَنَالَ الْعِلْمَ إِلَّا بِسِتَّةٍ سَأَلْتُكَ عَنْ مَجْمُوعِهَا بَيَانٍ ، ذُكَّاءٌ ، وَحِرْصٌ ، وَاصْطِبَارٌ ، وَبُلْغَةٌ ، وَإِرْشَادٌ

أُسْتَاذٍ وَطَوَّلُ زَمَانٍ.¹²¹

Artinya:

Engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan enam hal, saya akan mengabarkan kepadamu seluruhnya dengan jelas, yaitu: kecerdasan, semangat, kesabaran, biaya, petunjuk guru, dan waktu yang lama.

Di samping itu, guru dapat menanamkan rasa hormat (*respect*) dalam diri peserta didik, terhadap ilmu pengetahuan dan orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan itu, yakni para guru yang membimbing mereka, seperti yang dikemukakan oleh Imam al-Zarnûjî:

إِعْلَمْ أَنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَا يَنَالُ الْعِلْمَ ، وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا بِتَعْظِيمِ الْعِلْمِ وَ أَهْلِهِ ، وَتَعْظِيمِ الْأُسْتَاذِ وَ

تَوْفِيرِهِ.¹²²

IAIN PALOPO

Artinya:

¹²¹Imâm Burhânuddîn al-Zarnûjî, *Ta'limu al-Muta'allim Thariqu al-Ta'lim*, (al-Qâhirah: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1406 H.), h. 103.

¹²²*Ibid.*, h. 106.

Ketahuilah, sesungguhnya penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu dan manfaatnya kecuali dengan menghargai ilmu dan ahlinya, dan menghormati guru.

Dalam konteks ini, ada proses penanaman karakter bagi peserta didik, terutama dalam hal rasa hormat kepada guru dan ilmu pengetahuan yang diajarkannya, sehingga mereka mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat.

Lebih lanjut al- al-Zarnûjî menegaskan:

123" وَمِنْ تَعْظِيمِ الْعِلْمِ تَعْظِيمُ الْمُعَلِّمِ "

Artinya:

"... Dan sebagian dari sikap menghargai ilmu adalah sikap menghargai guru."

Sekaitan dengan itu, Lickona menyatakan:

*"Respect means showing regard for the worth of someone or something. It takes three major forms: respect for one self, respect for other people, and respect for all forms of life and the environment that sustains them."*¹²⁴

Artinya:

Rasa hormat berarti menunjukkan penghargaan terhadap harga diri orang lain ataupun hal lain selain diri kita. Terdapat tiga hal yang menjadi pokok, yaitu penghormatan terhadap diri sendiri, penghormatan terhadap orang lain, dan penghormatan terhadap semua bentuk kehidupan dan lingkungan yang saling menjaga satu sama lain.

¹²³*Ibid.*

¹²⁴Thomas Lickona, *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*, (New York: Bantam Books, 1992), e-book, h. 43.

- e. Disiplin, yaitu keteraturan dalam manajemen waktu dan administrasi, terutama dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Guru yang disiplin dalam mengelola proses belajar mengajar dan teratur dalam menata administrasi pembelajaran, kinerjanya lebih terukur dan mudah dievaluasi.
- f. Tanggung jawab, yaitu melaksanakan segala bentuk pekerjaan dan kewajiban yang diamanahkan kepadanya dengan baik dan maksimal, serta mampu dipertanggungjawabkan kepada diri dan lingkungan sekitarnya.

Keenam aspek keteladanan tersebut, merupakan hal yang sangat pokok untuk diwujudkan dalam diri seorang guru, sehingga ia mampu menampilkan sosok individu yang mampu menjadi model (teladan) bagi peserta didik, yang sesuai antara ucapan dan perbuatannya. Jika tidak demikian halnya, maka guru akan kehilangan wibawa di mata peserta didiknya. Seperti ungkapan Ibnu Abbas r.a. menyatakan: “Barang siapa ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya, maka dia telah mencoreng dirinya.”¹²⁵ Pernyataan ini sangat menitikberatkan arti keteladanan dari seorang guru kepada murid atau peserta didik yang ia sedang diajarnya.

IAIN PALOPO

C. Upaya Meningkatkan Profesionalitas dan Karakter Guru

Setelah diimplementasikannya Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, proses peningkatan profesionalitas guru melalui program sertifikasi mulai berlangsung. Akan tetapi, ada suatu hal yang harus dipikirkan

¹²⁵Muhammad Abdullah Ad-Duweisy, “Al-Mudarris wa Mahârât al-Taujih”, diterjemahkan oleh Izzudin Karim dengan judul, *Menjadi Guru Sukses dan Berpengaruh*, (Cet. VIII; Surabaya, 2011), h. 70.

pascasertifikasi, yakni setelah guru menjalani proses sertifikasi dan dinyatakan lulus sebagai guru profesional, akankah mereka diberikan kebebasan untuk berimprovisasi mandiri tanpa dievaluasi secara kontinu?

Pertanyaan ini layak dikemukakan karena, realitas kebanyakan guru setelah sertifikasi berada pada zona nyaman (*comfort zone*), dengan indikasi kurangnya minat untuk mengikuti program-program pelatihan atau workshop yang berkaitan dengan pendidikan, apatah lagi jika kegiatan tersebut membutuhkan kontribusi finansial.

Di samping itu, perlu juga dipahami bahwa sertifikasi dalam jangka waktu dua pekan dalam bentuk Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), atau Pendidikan Profesi Guru selama dua semester, belum dapat menggaransi sepenuhnya kualitas profesional guru, buktinya kasus kecurangan Ujian Nasional masih terus terjadi setiap tahun yang melibatkan guru, karena mengejar target persentase kelulusan. Inilah yang meruntuhkan prinsip-prinsip profesionalitas dan merusak citra guru di Indonesia. Idealnya, setelah kuantitas guru yang lulus sertifikasi semakin bertambah, seharusnya perilaku kecurangan Ujian Nasional yang sistemik tidak perlu terjadi lagi.

Oleh karena itu, paradigma yang harus dibangun oleh semua pihak adalah profesionalitas guru bukan sesuatu yang diperoleh secara instan, karena keprofesionalan itu merupakan proses yang tidak pernah berakhir (*never ending process*), sebagaimana dinamisnya perkembangan ilmu pengetahuan.

Sertifikasi guru merupakan pondasi atau langkah awal untuk meningkatkan berbagai kompetensi dan kapabelitas guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan, sekaligus membangun citra keguruan secara holistik. Bukan sebagai proses terakhir yang tidak membutuhkan evaluasi dan improvisasi.

Sebagai upaya peningkatan profesionalitas dan karakter guru setelah program sertifikasi, guna meningkat sumberdaya manusia dan meminimalisir prinsip asal jadi, dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Sistem Penilaian Kinerja Guru,¹²⁶ yaitu sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam kinerjanya.¹²⁷
2. Mengaktifkan kembali Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di tingkat kabupaten/kota sebagai wadah untuk mengaktualisaskikan ilmu yang telah diperoleh dari Pendidikan dan Latihan Profesi Guru atau Pendidikan Profesi Guru.

Sebelum program sertifikasi berlangsung, MGMP begitu marak dilaksanakan oleh setiap rumpun mata pelajaran, namun setelah sertifikasi berjalan, MGMP sangat jarang dilaksanakan.

¹²⁶Konsep Penilaian Kinerja Guru salah satunya diatur menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

¹²⁷ Nanang Priatna dan Tito Sukamto, *Pengembangan Profesi Guru*, (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 1.

3. Melakukan monitoring dan Evaluasi secara berkelanjutan, melalui instansi terkait, dengan memberikan *reward* dan *punishment* terhadap kinerja guru.
4. Menggiatkan kembali kegiatan Seminar, Pelatihan dan *Workshop* Pendidikan¹²⁸ bagi kalangan guru di berbagai level, baik lokal, regional maupun nasional, melalui instansi terkait, agar kompetensi paedagogik dan kompetensi profesional guru semakin meningkat.
5. Memberlakukan persyaratan karya tulis ilmiah atau sejenisnya dalam proses kenaikan pangkat atau golongan bagi kalangan guru, di semua level golongan,¹²⁹ sebagai motivasi untuk meneliti atau minimal membuat PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Kegiatan ilmiah seperti ini menjadi wadah peningkatan status dan kemampuan praksis yang sejalan dengan tugas yang diemban guru.¹³⁰
6. Memberikan bimbingan teknis kepada kalangan guru dalam membuat atau merakit soal-soal yang mendekati kualitas soal Ujian Nasional, khususnya guru mata pelajaran yang diujiannasionalkan, agar tidak terjadi kecurangan secara terus-menerus.

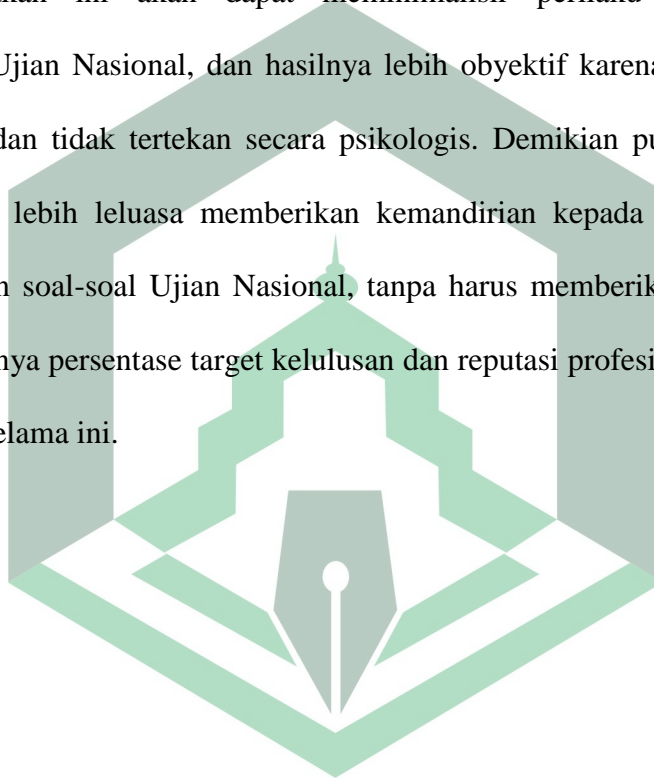
¹²⁸Ketika proses sertifikasi guru masih menggunakan jalur portofolio, animo guru dalam mengikuti kegiatan Seminar, Pelatihan dan *Workshop* Pendidikan sangat meningkat, meskipun hanya berburu sertifikat untuk perhitungan angka kredit. Setelah sertifikasi diubah dengan jalur PLPG atau PPG animo mereka menurun drastis.

¹²⁹Selama ini, persyaratan karya tulis ilmiah untuk kenaikan golongan, hanya diberlakukan dari golongan IVa ke golongan IVb.

¹³⁰Sudarwan Danim, *Pengembangan Profesi Guru: Dari Pra-Jabatan, Induksi, Ke Profesional Madani*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2012), h. 105.

7. Menetapkan kebijakan nasional, dengan tidak menjadikan hasil Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan peserta didik. Artinya, Ujian Nasional tetap diadakan untuk tingkat SMP dan SMA sederajat,¹³¹ tetapi penentuan kelulusan diserahkan kepada sekolah masing-masing.

Kebijakan ini akan dapat meminimalisir perilaku kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional, dan hasilnya lebih obyektif karena peserta didik lebih percaya diri dan tidak tertekan secara psikologis. Demikian pula dengan kalangan guru, mereka lebih leluasa memberikan kemandirian kepada peserta didik untuk menyelesaikan soal-soal Ujian Nasional, tanpa harus memberikan bantuan jawaban demi tercapainya persentase target kelulusan dan reputasi profesi dan institusi, seperti yang terjadi selama ini.



IAIN PALOPO

¹³¹Ujian Nasional untuk tingkat Sekolah Dasar atau sederajat telah dihapus pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Mei 2013 lalu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian atau pembahasan pada bab-bab sebelumnya, tentang profesionalitas dan karakter guru, serta keterkaitannya dengan perilaku kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional yang berimplikasi terhadap karakter peserta didik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Potret guru dalam sertifikasi melalui jalur Portofolio atau Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) atau Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jangka waktu tertentu, belum mampu menggaransi kompetensi guru secara komprehensif, karena realitas guru saat ini masih stagnan dalam berimprovisasi dan merasa berada pada zona nyaman (*comfort zone*) meskipun telah dinyatakan lulus sertifikasi.

2. Realitas guru dalam menghadapi ujian nasional, belum mencerminkan prinsip-prinsip profesionalitasnya, meskipun telah mengikuti program sertifikasi, karena masih terlibat dalam perilaku kecurangan dengan memberi jawaban kepada peserta didik. Sedangkan perilaku curang dalam ujian akan menghancurkan citra dan karakter guru, serta mentalitas peserta didik, hal ini tentu saja kontra produktif dengan pendidikan karakter yang sedang digalakkan pemerintah.

3. Integrasi profesionalitas dan karakter guru dapat diwujudkan dengan merealisasikan nilai-nilai keteladanan di hadapan peserta didik, seperti kedisiplinan, kejujuran, keikhlasan, semangat pembelajar dan tanggung jawab yang tinggi dalam

mengajar dan mendidik. Sehingga, guru bisa menjadi model (teladan) yang patut dicontoh oleh peserta didik. Karakter baik tanpa dipraktikkan tidak akan membawa implikasi apa-apa terhadap pembentukan karakter peserta didik.

B. Implikasi

1. Melalui penelitian ini diharapkan agar setiap guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi dan menyandang predikat profesional, harus mempertahankan dan meningkatkan profesionalitasnya dengan memanfaatkan tunjangan sertifikasi yang diterima untuk kepentingan pendidikan yang lebih tinggi, penyediaan sarana pembelajaran yang berbasis IT, seperti laptop, LCD dan internet, serta penambahan buku-buku referensi yang berkaitan dengan bidang keahlian masing-masing. Bukan dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan domestik kerumahtanggaan atau pembelian asset material semata.

2. Kalangan guru harus pro-aktif dalam meminimalisir perilaku kecurangan ketika pelaksanaan ujian nasional, karena hal itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip profesionalitas dan bertentangan pula dengan nilai-nilai kejujuran yang ingin ditumbuhkembangkan dalam dunia pendidikan.

3. Selanjutnya, untuk memulihkan kembali karakter guru yang selama ini telah ternodai oleh perilaku kecurangan saat ujian nasional, maka para guru harus memposisikan dirinya sebagai teladan di garda terdepan dalam menolak perilaku curang yang hanya berorientasi kepada prestise dan tingginya persentase angka

kelulusan, yang seolah-olah merepresentasikan hasil murni dari proses pembelajaran yang selama ini telah dilaksanakan.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ânul Karîm dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia,

Bandung: Hilal, 2010.

Al-Duweisy, Muhammad Abdullah, "*Al-Mudarrisu wa Mahârâti al-Taujih*", diterjemahkan oleh Izzuddin Karimi, dengan judul *Menjadi Guru yang Sukses dan Berpengaruh*, Cet. VIII; Surabaya: aLBA, 2011.

Asmani, Jamal Ma'mur, *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif*, Cet. XI; Jogjakarta: DIVA Press, 2011.

Baedowi, Ahmad, *Calak Edu 1: Esai-Esai Pendidikan 2008-2012*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012.

-----, *Calak Edu 2: Esai-Esai Pendidikan 2008-2012*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012.

Chatib, Munif, *Gurunya Manusia: Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara*, Cet. XII; Bandung: Kaifa, 2013.

-----, *Orang Tuanya Manusia: Melejitkan Potensi dan Kecerdasan Dengan Menghargai Fitrah Setiap Anak*, Cet. V; Bandung: Kaifa, 2013.

-----, *Sekolahnya Manusia: Sekolah Berbasis Multiple Intellegences di Indonesia*, Cet. XVII; Bandung: Kaifa, 2013.

Danim, Sudarwan, *Pengembangan Profesi Guru: Dari Pra-Jabatan, Induksi, Ke Profesional Madani*, Cet. II; Kencana Prenada Media Group, 2012.

Echols, John M. Dan Hassan Shadly, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XXIX; Jakarta: Gramedia, 2010.

Elfindri, et.al., *Soft Skill Untuk Pendidik*, Cet. II; t.t.; Baduose Media, 2011.

Fakhruddin, Asep Umar, *Menjadi Guru Favorit*, Cet. I; Jogjakarta: DIVA Press, 2009.

- Getteng, Abd. Rahman, *Menjadi Guru Profesional dan Ber-Etika*, Cet. VII; Jogjakarta: Grha Guru, 2012.
- Lickona, Thomas, *Educating for Character: How Oaur School Can Teach Respect and Responsibility*, New York: Bantam Book. 1992. e-Book.
- Listyarti, Retno, *Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Inovatif dan Kreatif*, Cet. II; Jakarta: Esensi, 2012.
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- , *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*, Cet. II; RajaGrafindo Persada, 2012.
- Mulyasa, Enco, *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- , *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Cet. VI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Musfah, Jejen, *Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik*, Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Nata, Abuddin, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional Pada SMP, M.Ts., SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK Tahun 2010/2011.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013.
- Priatna, H. Nanang dan Tito Sukamto, *Pengembangan Profesi Guru*, Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. IX; Jakarta: Kalam Mulia, 2011.

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, dalam Yudha Pandu (Ed.), Jakarta: Indonesia Legal Publishing, 2008.
- , *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, dalam Yudha Pandu (Ed.), Jakarta: Indonesia Legal Publishing, 2008.
- Rachman, M. Fauzi, *Shalat For Character Building: Buat Apa Shalat Kalau Akhlak Tidak Menjadi Lebih Baik*, Cet. I; Bandung: Mizania, 2007.
- Rimang, Siti Suwadah, *Meraih Predikat Guru dan Dosen Paripurna*, Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sagala, Syaiful, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Saleh, Akh. Muwafik, *Membangun Karakter dengan Hati Nurani: Pendidikan Karakter Untuk generasi Bangsa*, Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2012.
- Saptono, *Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter: Wawasan, Startegi, dan Langkah Praktis*, Cet. II; Jakarta: Esensi, 2011.
- Sudewo, Arie, *Best Practice Character Building, Menuju Indonesia Lebih Baik*, Cet. II; Jakarta: Republika, 2011.
- Suharsaputra, Uhar, dalam Nurul Falah (Ed.), *Menjadi Guru Berkarakter*, Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Sujanto, Bejo, *Cara Efektif enuju Sertifikasi Guru*, Cet. I; Depok: Raih Asa Sukses, 2009.
- Syafri, Ulil Amri, *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an*, Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Syatra, Nuni Yusvavera, *Desain Relasi Efektif Guru dan Murid*, Cet. I; Jogjakarta: Buku Biru, 2013.
- Wahyudi, Imam, *Mengejar Profesionalisme Guru: Strategi Praktis Mewujudkan Citra Guru Profesional*, Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Wan Daud, Wan Moh Non, *The Concept of Knowledge In Islam and its Implications For Education in a Developing Country*, London: Mansell Publishing, 1989.

- Wibowo, Agus, *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- , dan Hamrin, *Menjadi Guru Berkarakter: Strategi Membangun Kompetensi dan Karakter Guru*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Yamin, H. Martinis dan Bansu I. Ansari, dalam Saiful Ibad (Ed.), *Taktik Mengembangkan Kemampuan Individual Siswa*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- Yaumi, Muhammad, dalam Nurdin Ibrahim dan Darlan Sidik (Ed.), *Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013.
- , dan Nurdin Ibrahim, dalam Tri Suhartati dan Sitti Fatimah S. Sirate (Ed.), *Kecerdasan Jamak (Multiple Intellegences): Mengidentifikasi dan Mengembangkan Multi Talenta Anak*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013.
- Al-Zarnûjy, al-Imâm Burhân al-Islâm, *Kitab Ta'lim al-Muta'allim Thariq al-Ta'allum*, Maktabah Qahirah, 1989.
- Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*, Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2011.

Artikel dan Internet

- Agus Wibowo, *Urgensi Pendidikan Karakter*, Harian Pelita, Edisi 31 Maret 2010.
- , *Stop Plagiarisme dalam Pendidikan*, Harian Media Indonesia, Edisi 2010.
- Ratna Megawangi, *Pendidikan Holistik Berbasis Karakter*, dalam <http://www.langitperempuan.com/ratna-megawangi-pelopor-pendidikan-holistik-berbasis-karakter/> diakses tanggal 05 Februari 2014.
- Sunaryo Kartadinata, *Strategies In Improving Teacher Quality In Indonesia*, dalam [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/Jur. Psikologi Pend Dan Bimbingan/195003211974121Sunaryo_Kartadinata/Improving_Teacher_Quality.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/Jur._Psikologi_Pend_Dan_Bimbingan/195003211974121Sunaryo_Kartadinata/Improving_Teacher_Quality.pdf).

Survei UPI: *Kecurangan UN Libatkan Guru dan Kepala Sekolah*, 2 Oktober 2013. Diakses dari <http://www.suarapembaruan.com> tanggal 30 Januari 2014.



IAIN PALOPO

. Lampiran Laporan Kecurangan yang pernah terjadi dalam Ujian Nasional

<p style="text-align: center;">Laporan Lengkap Kecurangan UN 2007</p> <p style="text-align: center;">KOMUNITAS AIR MATA GURU</p> <p style="text-align: center;">LAPORAN KRONOLOGIS</p> <p style="text-align: center;">PERISTIWA KECURANGAN UJIAN NASIONAL 2007</p>
<p>I. LAPORAN PENGAWAS UJIAN NASIONAL 2007</p> <p>1. Laporan: Patar Tambunan, S.Pd (26 Tahun); Mengawas di SMU Timbul Jaya Medan</p> <p>13 April 2007, 14.00-17.00</p> <p>Diadakan rapat se Sub-Rayon 017, dipimpin oleh Ketua Rayon 017. Diadakan makan bersama dan pengarahan seluruh pengawas di sub-rayon dan kepala sekolah di sub-rayon tersebut. Seluruh kepala sekolah memberikan pengarahan dan petunjuk agar dalam pengawasan Ujian Nasional mensukseskan strategi pelulusan siswa, dengan cara mengizinkan siswa mendapatkan jawaban dari guru, pihak luar atau siapa saja yang membantu.</p> <p>17 April 2007, 08.00-10.00, Ujian Bahasa Indonesia untuk program IPA</p> <p>Mengawasi ujian di ruang 52, SMA Timbul Jaya, di Simalingkar Medan. Seorang guru wanita memberikan secarik kertas kecil (Bukti Terlampir) yang berisi jawaban UN. Sewaktu Patar ke kamar mandi guru tersebut membagikan kertas jawaban. Patar Tambunan menangkap 2 lembar kertas dari siswa. Selain itu guru tersebut juga memberikan kertas jawaban kepada Patar untuk dibagikan, karena tidak tahu bahwa Patar telah menangkap kertas yang telah dibaginya. Namun setelah selesai ujian, guru tersebut mendapat laporan dari siswa mengenai penangkapan kertas jawaban. Guru tersebut menegur Patar, karena tidak mendukung program Rayon 017. Patar kemudian dihubungi melalui SMS untuk menjumpai Kepala Sekolah SMA 17 Medan. Patar tidak memenuhi undangan tersebut.</p> <p>18 April 2007, 08.00-10.00, Ujian Ekonomi untuk Program IPS</p> <p>Mengawasi di ruang 53, SMA Timbul Jaya Simalingkar Medan. Guru yang sama memberikan secarik kertas yang berisi jawaban UN secara diam-diam pada saat Patar menandatangani absen pengawas. Patar kemudian menangkap selembar kertas dari</p>

seorang siswa. Kepala sekolah SMA 17 dihubungi oleh kepala sekolah SMA Timbul Jaya. Kemudian Kepala Sekolah SMA 17 berbicara melalui HP dengan Patar dan meminta Patar meninggalkan lokasi UN dan kembali ke SMA 17. Patar menolak dan tetap mengawas. 09.30 wakil kepala sekolah SMU 17 menjumpai Patar ke lokasi ujian dan meminta Patar untuk menjumpai Kepala Sekolah.

19 April 2007, 08.00-10.00, Ujian Bahasa Inggris untuk IPA dan IPS

Mengawasi Ujian di Ruang 52, SMA Timbul Jaya Simalingkar Medan. Pada pukul 09.30 guru yang sama dari SMU Timbul Jaya menyelipkan kertas jawaban kepada siswa, hal ini disaksikan oleh Patar, namun tidak ada kertas yang ditangkap. Patar meminta guru tersebut keluar ruangan, namun ditolak. Kemudian Patar memeriksa siswa namun tidak ditemukan apapun. Kemudian seorang siswa permisi ke Kamar Mandi, sekembalinya Patar memeriksa dan menemukan tulisan jawaban di tangan siswa. Patar kemudian menghapus kunci jawaban tersebut. Insiden ini menyebabkan keriuhan dan banyak gur berkumpul di depan ruang ujian 52. Kepala Sekolah Timbul Jaya datang dan membubarkan kerumunan. Kemudian Kepala Sekolah membagikan kertas jawaban, satu dari antaranya ditangkap oleh Patar. Yang lain tidak bisa dikendalikan lagi.

23 April 2007, 11.00

Seorang guru di SMA 17 memberitahukan bahwa ada siswa yang mengancam Patar bahwa apabila mereka tidak lulus UN, mereka akan membunuh Patar.

2. Laporan: Daud M. Hutabarat, S.Pd. (27 Tahun); Mengawas di SMP N.19 Medan

Tanggal 24 April 2007

Pukul 08.00 WIB

Peserta dan Pengawas UAN sudah berada dalam kelas. Daud dan seorang pengawas dari SMP swasta Panca Budi Medan mengawas di Ruang 07, LJUN (identitas peserta Ujian) dibagikan. Daud M. Hutabarat dan teman pengawas melakukan pengisian berita acara dan menjalankan Daftar Hadir Peserta UN.

Pkl. 09.30 WIB

Bapak Wakil Kepala Sekolah sekolah itu datang untuk membagikan jawaban sebanyak 6 lebar untuk 25 Soal, dengan permintaan hanya sebatas lulus. Kemudian beberapa menit pihak sekolah datang untuk mengambil jawaban yang telah

dibagikan Bapak Wakil Kepala Sekolah tadi, tapi masih ada 4 lembar lagi yang tinggal dan Daud M. Hutabarat mengambilnya.

Pkl. 11.00

Daud M. Hutabarat menjumpai Kepala sekolah tempat Daud mengajar untuk menyampaikan semua yang terjadi. Kepala sekolah memberitahukan bahwa Kepala Sekolah Daud sudah menerima telepon dari Sub Rayon (tempat Daud mengawas). Kepala Sekolah Daud memberi perintah untuk hari kedua dan ketiga Pelaksanaan UN (18-19 April 2007), Daud M. Hutabarat tidak mengawas lagi.

3. Laporan: Neny Tarigan, Guru SMA Nasrani 3

Tanggal 17 April 2007, Pukul: 09.10

Kepala Sekolah tempat Neny mengajar menelpon Neni untuk menginstruksikan Neny memberi jawaban kepada siswa.

Tanggal 18 April 2007

Pukul 07.15 WIB

Kepala Sekolah meminta siswa untuk mengumpulkan HP mereka. 2 HP yang terkumpul.

Pukul 08.30 WIB

Kepala Sekolah meminta Neny untuk mengambil HP seorang siswa yang sedang ujian karena mendapat informasi dari salah seorang guru bahwa siswa tersebut membawa HP ke ruang ujian. Dengan terpaksa, siswa tersebut menyerahkannya.

Pukul 09.30 WIB

IAIN PALOPO

Wakil Kepala Sekolah masuk ruangan ujian untuk mengambil HP siswa yang lain (di ruangan yang sama).

Pukul 10.00 WIB

Dari enam HP yang terkumpul, ada lima HP yang berisi jawaban UN.

Pukul 20.00 WIB

Neny mendapat informasi dari seorang siswa dan memberitahu Neny nama-nama siswa yang mendapat jawaban melalui HP dan menyatakan kekecewaannya atas sikap pengawas yang tidak bertugas dengan baik.

Tanggal 19 April 2007; Pukul 09.15 WIB, Kepala Sekolah ikut mengawas di ruangan Ujian karena Kepala Sekolah memandang bahwa Pengawas tidak menjalankan tugas dengan baik (dengan cara mengizinkan siswa membawa dan membuka HP pada saat ujian berlangsung).

Tanggal 28 April 2007

Pukul 09.00 – 10.00 WIB

Serah terima jabatan (Kepala Sekolah mengundurkan diri). Neny dipanggil oleh Ketua Yayasan dan meminta keterangan sehubungan dengan beredarnya berita bahwa Komunitas Air Mata Guru mengungkap kecurangan UN (Nama Sekolah tersebut di ekspos di media). Berkaitan dengan itu, Neny dianggap melakukan kesalahan yang fatal karena membawa nama sekolah tersebut ke publik. Neny disuruh untuk mengundurkan diri saja atau dipecaat dengan tidak hormat

4. Laporan: Luhot Simamora, S.Pd (27 tahun); mengawas di SMK-TI Bina Satria Medan

16 April 2007, PUKUL.10.20 – 11.30 WIB

Guru-guru berkumpul mengikuti rapat pengawas di kantor Guru SMK Teladan Medan. Luhot mendapat SK mengawas di SMK Bina Satria. Kepala SMK tempat Luhot mengajar juga menjabat sebagai Kepala Sub Rayon 13.

17 April 2007

Pukul 07.30 – 10.00 WIB

Semua Pengawas di SMK Bina Satria, Koordinator, satu orang dari Tim Independen (Sutri, Mahasiswa FMIPA USU) hadir di lokasi ujian.

Pukul 09.00 – 09.30 WIB

Pengawas dari Dinas, Kepala Sekolah, dan Kepala Sub Rayon mengadakan inspeksi dan menanyakan apakah semua berjalan dengan baik. Ujian berlangsung baik.

18 April 2007

Pukul 08.00

Soal dibagikan (Mata Pelajaran: MATEMATIKA)

Pukul 08.10 WIB

Koordinator Pengawas memanggil Luhot keluar sebentar untuk menyampaikan pesan dari Bapak Kepala Sekolah tempat Luhot mengajar. Pesan itu adalah supaya Luhot tidak mengawas dengan ketat (Kepala Sekolah mendapat laporan dari Kepala Sekolah tempat Luhot mengawas).

Pukul 09.00 – 09.20 WIB

Pihak Sekolah itu masuk ke ruangan dan ingin memberi kunci jawaban sebanyak 16 butir untuk setiap paket. Luhot tidak memberi ijin. Beberapa menit kemudian, Kepala Sekolah masuk dengan gusar ingin memastikan apakah jawaban sudah dibagikan kepada siswa. Mendengar bahwa Luhot tidak mengizinkan, Kepala Sekolah tersebut mengabaikan Luhot dan membacakan jawaban.

19 April 2007

Pukul 07.20

Luhot melapor ke Tim Independen tentang kecurangan tersebut kepada Tim Independen

Pukul 09.00 – 09.20 WIB

Pihak sekolah tersebut datang membawa jawaban Bahasa Inggris dan membacakan jawaban-jawaban setiap paket.

5. Laporan : Roy F Silalahi SPd (25 tahun); Mengawas di SMA Negeri 15 Medan.

18 April 2007.

Pukul 08.30 Ujian Matematika.

Mengawas di salah satu ruangan di SMA Negeri 15 Medan. Roy menangkap HP seorang siswa yang sudah berisi kunci jawaban. kemudian Roy mengambil HP tersebut, dan melaporkan insiden ini di dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian Nasional 2007.

6. Laporan oleh: Sondang Saragih, S.Pd.;guru di SMK 2 Teladan Sumut; mengawas di SMK Medan Putri.

17 April 2007-04-29

Pukul 09.40 WIB

Pada saat saya mengawas, tiga orang guru sekolah itu memasuki ruangan kelas dan berbicara kepada teman saya yang juga pengawas. Kemudian seolah-olah mereka memeriksa data-data siswa,merka memberikan kunci jawabankepada masing-masing siswa dan dengan cepat mereka mengumpulkan kembali kertas jawaban dan keluar dari ruangan. Sebelumnya berita acara sudah ditulis dengan keterangan ujian berjalan dengan baik, dan pada hari pertama lembar jawaban UN disegel di dalam ruangan.

18 April 2007

Pukul 09.30 WIB

Dengan cara yang sama guru yang kemarin datang lagi ke ruangan dan langsung membagikan jawaban ke siswa. Setelah keluar ruangan saya masih sempat mengambil beberapa lembar tulisan yang berisi jawaban-jawaban yang telah difotokopi sebelumnya.

19 April 2007-04-29

Pukul 09.40 WIB

Dengan cara yang sama mereka datang lagi dengan jawaban-jawaban dan saya berusaha untuk menahan mereka supaya tidak memberikan jawaban tersebut kepada siswa, tetapi guru tersebut berkata, “ini sudah kesepakatan kita bersama, Bu, dari rayon”. Kawan saya mengawas keluar ruangan, sementara guru tadi langsung saja mmbacakan tidak dengan membagi-bagikan lembaran kecil tadi.sebelumnya saya katakan kepada setiap siswa saat mengisi absen supaya mereka tidak percaya kepada orang lain. Dalam semua ujian ini kita sudah disuruh mengisi berita acara bahwa ujian berjalan lancar.

Pukul 11.00 WIB

Di angkot saya bertemu dengan beberapa siswa yang baru mengikuti UN diantaranya siswa SMK BM Medan Putri, SMA Josua, dan SMA Methodist 2. saya mendengar bahwa mereka menerima bantuan dari guru.

7. Laporan: Rimbun Siringo-ringo, S.Pd; 24 Tahun; mengawas di SMK BUDI AGUNG Medan

17 April 2007. Pukul 09.00, Ujian Bahasa Indonesia

Saudara Rimbun mengawas ujian disalah satu ruangan SMK Budi Agung Medan. Sewaktu ujian berlangsung dua orang guru SMK Budi Agung masuk ruangan ujian. Kedua guru tersebut membawa map bertuliskan 40 kunci jawaban paket A dan B. kemudian kedua guru itu memperlihatkan map kearah siswa, lalu siswa menulis jawaban yang tertera. Setelah dianggap selesai kedua guru tersebut meninggalkan ruangan. Saudara Rimbun tidak dapat berbuat apa-apa.

18 April 2007. Pukul 09.00, Ujian Matematika

Saudara Rimbun mengawas ujian disalah satu ruangan SMK Budi Agung. Saat ujian berlangsung saudara Rimbun permisi ke toilet. Ketika kembali diruangan ujian, rekannya mengawas mengatakan kejadian yang sama terualang kembali, yaitu guru dari pihak sekolah tersebut memberi jawaban kepada siswa.

19 April 2007. Pukul 08.00, Ujian Bahasa Inggris

Saudara Rimbun mengawas ujian disalah satu ruangan SMK Budi Agung. Sewaktu ujian berlangsung, salah satu guru dari pihak sekolah tersebut datang mengambil soal yang sisa. Satu jam kemudian guru tersebut masuk ruangan ujian dengan membawa map yang bertuliskan jawaban dan menunjukkan kearah siswa. Saudara Rimbun hanya melihat dan tidak bisa berbuat apa-apa.

8. Laporan: Rohotni Sinurat. Mengawas di SMP MARISI Medan.

24 April 2007. Pukul 07.30, Ujian Bahasa Indonesia

Sebelum ujian, Seluruh pengawas berkumpul di ruangan (kantor). Kepala sekolah memberikan pengarahan agar para pengawas menganggap siswa sebagai anak sendiri. Sebelum pukul 08.00 saudara Rohotni masuk ruangan ujian. Diawali dengan seluruh siswa mengisi Bio Data. Ketika dalam ruang ujian, pengamat dari rayon masuk ruangan, lalu mengatakan kepada pengawas agar menyaring pengarahan dari kepala sekolah tersebut, jawaban yang diberikan dibatasi \pm 26 saja. Saya menolak pernyataan tersebut. Tetapi pada saat ujian berlangsung \pm jam 09.30, seorang guru wanita masuk dan menyerahkan absen kepada pengawas. Guru tersebut langsung membacakan jawaban kepada siswa \pm 26 kunci jawaban bidang studi Bahasa Indonesia. Kemudian saudara Rohotni menemui kepala sekolah, dan kepala sekolah mengatakan agar mengasihani siswa. Saudara

Rohotni menolak keras jawaban diberi pada siswa.

25 April 2007. Pukul 07.30, Ujian Matematika

Usai membagikan Lembar Jawaban UN, pengawas membagi soal UN pada pukul 08.00. Sekitar pukul 09.15 guru yang pada hari pertama masuk ruangan ujian. Guru tersebut permisi pada pengawas, guru tersebut membacakan 18 jawaban bidang studi matematika kepada siswa.

26 April 2007. Pukul 07.50, Ujian Bahasa Inggris

Saudara Rohotni kembali mengawas, kejadian pada hari kedua terulang kembali. Guru pihak sekolah memberi \pm 26 jawaban Bidang studi Bahasa Inggris. Usai ujian seluruh pengawas berkumpul di kantor. Kepala sekolah dan pengamat dari rayon memberikan pengarahan dan ucapan terima kasih. Dalam pengarahan kepala sekolah dan pengamat dari rayon mengatakan agar para pengawas menjaga kerahasiaan yang terjadi selama UN berlangsung.

9. Laporan: Herlina Saragih. Mengawas di SMP N 16 Medan

24 April 2007. Pukul 09.30, Ujian Bahasa Indonesia

UN dimulai pukul 08.00, awalnya UN berlangsung dengan aman dan tertib, hingga pukul 09.30. Kemudian seorang petugas pelaksana UN (ibu guru yang berpakaian dinas) masuk ke ruangan. Guru tersebut minta ijin pada pengawas untuk membantu siswa. Saudara Herlina terkejut dengan pernyataan tersebut, dilema baginya untuk melarang tindakan curang tersebut. Akhirnya sekitar 20 jawaban dari 50 soal jawaban dibacakan kepada siswa SMP N 16.

25 April 2007. 09.30 Ujian Matematika

Pelaksanaan UN pada hari ke dua berlangsung aman mulai pukul 08.00 hingga Pada pukul 09.35 seorang guru PNS pria yang memberi jawaban masuk ruangan dan langsung membacakan jawaban sebanyak 20 dari 30 soal matematika. Saudara Herlina tak hanya terdiam.

26 April 2007. Pukul 09.30, Ujian Bahasa Inggris

Kejadian yang sama terulang kembali. 20 jawaban tetap diberikan 30 menit sebelum selesai ujian. Pada hari ke tiga siswa hanya menunggu jawaban dari guru yang memberikan jawaban, lembar jawaban kosong hingga guru pemberi jawaban datang. Saudara Herlina tidak memiliki keberanian menegor mereka. Berita acara

kosong tetapi saudara Herlina tetap menandatangani.

10. Laporan: Risda Butar butar. Mengawas di SMA AMIR HAMZAH

18 April 2007. Pukul 08.00 – 10.00, Ujian Matematika

Guru di sekolah tersebut memasuki ruangan ujian sekalipun saudara Risda tidak memberi ijin. Guru tersebut masuk dengan alasan memeriksa data siswa. Guru tersebut mendekati meja siswa, dan memberikan sesuatu ke pada siswa. Setelah empat meja dilalui saudari Risda menegaskan data siswa sudah diperiksa pengawas. Setelah guru tersebut siswa yang mejanya dilalui mengisi jawaban beberapa soal tanpa membaca soal lagi. Hari pertama dan ke tiga saya tidak mengawas.

11. Laporan: J. Ruthmiaty Sihombing, S.Pd. Tempat mengawas SMA N 4 Medan

17 April 2007. 08.00 – 10.00 Ujian Bahasa Indonesia

Saudara Ruthmiaty mengawas di ruang 9 dan UN berjalan dengan baik.

18 April 2007. Pukul 08.15 Ujian Matematika

Sebelum saudari Ruthniaty membagikan lembar soal dan lembar jawaban saudari Ruthniaty meminta anak-anak untuk mengumpulkan HP ke meja guru. Anak melakukannya tetapi rekan kerja saudari Ruthniaty dalam mengawas mengatakan tidak usah melakukan demikian karna kesepakatan rayon untuk tidak mengumpulkan HP. Beberapa menit kemudian, rekan kerja saudari Ruthniaty menerima telepon. HP yang dipakai bukan HP teman saya yang mengawas itu, tidak tahu tepat HP siapa itu yang jelas yang memberikan kepada teman saya itu adalah phone SMA 4. saya tidak dengar pembicaraan mereka tetapi saya hanya mendengar jawaban teman mengawas saya itu demikian “bukan saya pak yang melakukan, tetapi teman saya dari methodis, tadi saya sudah bilang agar jangan dikumpulkan” demikian jawabnya. Setelah HP ditutup itu bilang ke saya “kan, tadi saya sudah bilang bahwa tidak usah dikumpul, saya jadi dimarahi kepala sekolah saya (tempat dia mengajar) jawab saya ibu ngak usah takut, kan sudah ibu bilang bukan ibu tetapi saya yang melakukannya. Saya berhasil menhandel setelah itu ujian berlangsung dengan baik.

19 April 2007. 09.00 Ujian Bahasa Inggris

Saya menemukan contekan seorang siswa yang lengkap paket A / B. kemudian

saya Tanya itu didapatnya dari luar sebelum ujian UN pada hari itu berlangsung.

12. Laporan: Rupina Simanjuntak. Mengawas di SMA SWASTA PULAU KURAU

17 April 2007. 08.00 – 10.00 Ujian Bahasa Indonesia

Jam 08.20 setelah selesai kami bagi soal kordinator memanggil pengawas masing-masing satu orang dari ruagan karna sekolah kecil jadi pengawas hanya ada empat orang, jadi mewakili masing-masing kelas dua orang, independent satu orang saya salah satunya dari pengawas mengatakan tidak setuju untuk membantu siswa lewat memberi jawaban. Akhirnya kordinator melaporkan kepada kepek saya yaitu sebagai rayon. Dan kepek yaitu ibu Dra. Hj. Nurlaila langsung tarpon saya dan marah-marah dia bilang supaya besok supaya jangan itu lagi kita harus bisa kerjasama. Tapi jawaban saya kenyataannya mereka memberikan buk saya bilang.

18 - 19 April 2007 tidak ada masalah.

13. Laporan oleh: Aftati Fiolena Haloho. Mengawas di SMA N 1 Tanjung Pura Langkat.

16 April sekitar pukul 12.00 WIB

Rapat dengan wakil kepala sekolah, dan diberi pengarahan agar ketika pelaksanaan UN guru-guru mengijinkan orang yang masuk ke ruangan UN untuk memberikan jawaban. Kami disuruh untuk membutakan mata, menulikan telinga, dan menutup mulut dengan peristiwa yang terjadi ketika UN.

17 April 2007. 07.30 Ujian Bahasa Indonesia

Pengarahan dari salah seorang guru, supaya pelaksanaan UN dilaksanakan dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh rayon tiga dan Bupati, kepala dinas dan kepala-kepala sekolah yaitu mengijinkan seorang guru yang akan masuk memberikan jawaban kepada siswa. Jam 08.00 – 10.00 saya mengawas di ruang empat, ketika UN berlangsung satu jam seorang guru masuk dan memberikan jawaban kepada siswa yang paket A dan paket B secara diam-diam. Lalu setelah itu guru tersebut ngobrol sebentar dengan kami, setelah dia keluar saya mengawasi semua siswa yang diberi jawaban dengan ketat, sampai kertas itu dioper ke siswa lain lalu saya ambil, semua siswa komplek dan teman saya mengawas pun komplek menyuruh saya untuk membiarkan siswa mengambil jawaban dan memberi jawaban. Setelah hampir selesai UN hari pertama guru

yang memberi jawaban tadi masuk lagi dan bertanya pelan-pelan kepada siswa lalu saya lihat siswa menunjuk saya dan mengatakan bahwa jawaban saya ambil lalu guru tersebut keluar.

Jam 10.00 kami dipesan oleh wakil kepala sekolah untuk kembali ke sekolah kami (SMA Sri langkat secepat mungkin.

Jam 10.30- 11.00 Kami dimasukkan kedalam suatu ruangan disuruh untuk menghapus jawaban siswa lalu saya bertanya untuk menegaskan kembali “apakah kami disuruh mengganti “? Lalu jawabnya “ya” lalu saya bilang itu bertentangan dengan hati nurani saya kemudian saya disuruh keluar dengan pesan untuk tutup mulut untuk semua kejadian tersebut.

18 April 2007.08.00-10.00.Mata pelajaran Matematika

Mengawas diruang 3 SMA N 1 Tanjung Pura Langkat.seorang guru masuk dan memberikan jawaban kepada siswa, tetapi sebelumnya guru tersebut menyuruh teman sayamengawas untuk memberikan jawaban kepada siswa dan teman saya menolaknya dan guru itu sendiri yang langsung memberikan jawaban, setelah dia keluar saya langsung mengambil jawaban tersebut tetapi yang saya temukan hanya jawaban paket B.

10.45-11.00 Wakil keapal sekolah saya (SMA Srilangkat) menghubungi saya lewat telepon dengAN menegor karena dianggap tidak melakukan kesepakatan yang sudah disepakati. Lalu beliau marah dan menyuruh Aftati untuk tidak mengawas lagi besok harinya dan beliau menyampaikan akan mencari pengganti saya untuk mengawas.

19 April 2007. Mata Pelajaran B. Inggris

Aftati tidak mengawas lagi karena sudah digantikan oleh orang lain.

14. Laporan Oleh : Hartati Siregar SPd (32 Tahun)Mengawas di SMK Karya Kesuma Medan

17 April 2007 09.30. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia.

Mengawas di salah satu ruangan di SMK karya kesuma seorang guru (Hartati tidak mengenalnya tetapi temannya mengawas mengenalnya) guru yang masuk meminta ijin kepada kami untuk memberi kertas kunci jawaban. Teman saya bilang “ silahkan “ tetapi Hartati mengatakan “ saya tidak setuju “ lalu terjadi perdebatan kecil di ruangan :

Ibu guru : saya hanya memberi 15 nomor jawaban sesuai dengan kesepakatan rayon.

Hartati : “ Pribadi saya tidak setuju, saya serahkan kepada pihak sekolah “

Selanjutnya Ibu guru tersebut memberikan kunci jawaban kepada beberapa orang siswa, ketika Hartati berjalan hendak mencek kembali LJUN siswa, seorang siswa tanpa takut dan tanpa segan meletakkan diatas meja kertas kunci jawaban dan menulis jawaban tersebut lalu Hartati mengambil jawaban tersebut.

18 April 2007. Mata Pelajaran Matematika

Hartati tetap mengawas di SMK Karya Kesuma dan mengalami hal yang sama terjadi seperti hari pertama tetapi tanpa perdebatan lagi Hartati tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya melihat dan membiarkan dengan kesal.

19 April 2007. Mata Pelajaran Bahasa Inggris

Hartati tetap mengawas di SMK Karya Kesuma dan tetap mengalami hal yang sama pada hari I dan hari ke II. Guru kembali masuk kedalam ruangan dan memberikan kertas kunci jawaban yang lebu banyak kepada siswa. Kira- kira 10 menit sebelum ujian berakhir kepala sekolah SMK Karya Kesuma masuk kedalam ruangan dan mengatakan “ Polisi akan datang jadi pesan pak Nainggolan (Ketua Rayon / Kepala sekolah SMK NEGERI I Medan) kalau ditanya bilang saja semua baik-baik”.

Hartati Berkata :”Hm.....ohya.....”?

Kesempatan ini gunakan untuk mengumpulkan kertas kunci jawaban yang sudah dibagi kepada siswa. Hartati berkata “ Polisi mau datang jadi kumpulkan semua kertas-kertas tadi nanti ketahuan “(Hartati jadikan sebagai bukti).

15. Laporan Oleh :Nama: Heny Siregar SPd ; 25 Tahun, Mengawas di SMA Swasta Kartika I Medan.

17 April 2007. 07.30. Ujian Bahasa Indonesia

Di salah satu ruangan SMA Swasta Kartkia I, Pihak sekolah / Kepala sekolah Kartika I menyampaikan kepada semua pengawas untuk mengawas tidak terlalu “ketat” dan pernyataan itu juga sudah disepakati rayon dengan mengatakan supaya kita bisa mensukseskan UN dengan baik karna mereka adalah anak-anak bangsa.

Kedalam ruangan seorang guru datang ke kelas dengan alasan memeriksa biodata siswa yang meskipun sebenarnya kami pengawas sudah memeriksa biodata siswa terlebih dahulu.

18 April 2007. 07.25.Ujian Matematika.

Kepala Sekolah SMA Swasta Kartika I memanggil Heny untuk bicara dan menyampaikan supaya Heny “ jangan mengawas terlalu ketat kemudian Heny memberikan pernyataan “ saya hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab saya dengan benar “. Kemudian Heny tetap mengawas disalah satu ruangan, kejadian seperti hari pertama tetap terjadi dimana seorang guru masuk kedalam ruangan dengan alasan memeriksa biodata siswa

19 April 2007.09.55. Ujian Bahasa Inggris

Heny tetap mengawas di SMA Swasta Kartika I, seorang guru masuk kedalam ruangan dengan alasan memeriksa biodata siswa beberapa waktu kemudian Heny menemukan kertas kunci jawaban dari siswa yang diberikan oleh guru yang masuk kedalam ruangan.

16. Laporan: Eka. M SPd (26 tahun), Mengawas di SMK Negeri 5 Medan.

17 April 2007. 07.20- 07.40. Ujian Bahasa Indonesia

Disalah satu ruangan SMK Negeri 5 Medan guru pengawas berkumpul untuk diberi pengarahan agar pengawas tidak berjalan-jalan dan “memelototi” siswa akan menjatuhkan mental mereka dan menyampaikan instruksi berita acara dengan “ AMAN TERTIB DAN LANCAR”

Pukul 08.05- 10.00 Eka mengawas di ruang 6 kira-kira 45 menit sebelum waktu ujian berakhir Eka memeriksa LJUN siswa (biodatanya) ternyata hampir semua siswa belum mengisi lembar jawaban walaupun ada yang terisi hanya 5-7 nomor. 30 menit sebelum berakhir ujian 3 orang guru (2 perempuan 1 laki-laki) masuk kedalam ruangan dan salah seorang guru pria mengambil posisi berdiri ditengah ruangan DAN LANGSUNG MENDIKTEKAN JAWABAN UN SESUAI DENGAN NOMOR KODE / PAKET SOAL. Eka bingung tidak dapat berbuat apa-apa.

18 April 2007. 08.05-10.00. Ujian Matematika

Mengawas di ruang 7 SMK Negeri 5 Medan kejadian sama dengan hari pertama, Eka menyaksikan salah seorang guru masuk kedalam ruangan dan

membacakan kunci jawaban sesuai dengan kode soal.

19 April 2007. 08.05-10.00. Ujian Bahasa Inggris

Mengawas di ruang 9 SMK Negeri 5 Medan. Satu jam sebelum ujian berakhir ada 4 orang guru/ pegawai dari sekolah tersebut datang dan masuk secara bergantian kedalam ruangan. Ada yang meminta tanda tangan pengawas, berita acara, dan memberikan amplop berisi uang transport pengawas berbarengan dengan seorang guru yang membacakan kunci jawaban kepada siswa.

Catatan : Hari I serah terima berita acara dan segel amplop LJUN diedarkan keruangan ujian. Hari ke II dan III tidak dilakukan lagi hal seperti hari pertama tapi LJUN disegel yang bersangkutan, serah terima berita acara ditandatangani oleh kepala sekolah dan tim pemantau di kantor sekolah yang diminta dari pengawas ujian.

17. Laporan: E. Ht. Julu SPd (32 Tahun) Mengawas di SMA Negeri I Hinai Langkat.

17 April 2007. 07.45. Ujian Bahasa Indonesia

Sebelum E. Ht Julu masuk kedalam ruangan selaku pengawas sudah terlebih dahulu menerima pengarahan dari SMA negeri I Hinai Langkat. Pengarahan tersebut menyatakan agar “mengawas jangan terlalu ketat dan tolong agar siswa dibantu “. Setelah E. Ht. Julu berada di salah satu ruangan SMA Negeri I Hinai langkat bocoran kunci jawaban diberikan melalui temannya mengawas kemudian E. Ht Julu mengatakan kepada temannya “ Kalau saya tidak mempunyai fungsi lagi akhirnya E. Ht. Julu menjumpai kordinator rayon lalu kordinator bilang nanti kita bersama-sama kesekolah tersebut dan membicarakan hal yang terjadi akhirnya mereka mengatakan itu salah metode.

18 April 2007. 08.00-10.00. Ujian Matematika

Mengawas di salah satu ruangan SMA Negeri Hinai Langkat seorang guru masuk kedalam ruangan dengan memberikan absent sekagus memberikan jawaban kepada siswa kemudian E. Ht .Julu menarik kunci jawaban yang telah diberikan kepada siswa setelah guru yang bersangkutan pergi meninggalkan ruangan.

19 April 2007. 08.00-10.00. Ujian Bahasa Inggris

Dua orang guru minta tolong agar di beri ijin memberi jawaban kepada siswa.

E. Ht. Julu tetap tidak memberikan ijin sampai selesai ujian.

18. Laporan: Bertha Sijabat SPd (32 Tahun) Mengawas di SMA Imanuel Medan.

17 April 2007.07.15. Ujian Bahasa Indonesia.

Disalah satu ruangan semua pengawas mendapat pengarahan dari kepala sekolah SMA Imanuel Medan (Drs. Ir .Pasaribu, MPd) menyatakan” semua rayon I telah menyepakati tidak boleh “ terlalu” misalnya “ketat”, harus ada saling pengertian.

10.30 Kepala sekolah yang bersangkutan datang menjumpai Bertha setelah ujian bahasa Indonesia selesai mengatakan “ bu Jangan terlalu ketat dan terlalu melotot itukan anak-anak ibu juga “, kemudian pengawas dari sekolah inipun kesekolah luar “ kami bilang untuk tidak terlalu ketat. Lalu Bertha mengatakan “ arti kata ketat itu bagaimana ?” lalu kepala sekolah mengulangi maksud yang sebelumnya.

19 April 2007. 08.25. Ujian Bahasa Inggris

Mengawas di ruang 47 SMA Imanuel . Kepala SMA Imanuel masuk ke ruangan tempat saya mengawas dengan alasan menanyakan biodata siswa sambil menuju meja siswa dan meletakkan secarik kertas yang isinya kunci jawaban bahasa inggris kemudian memberikannya lagi kepada siswa yang duduk agak belakang. Lalu siswa tersebut dengan rasa tidak bersalah siswa tersebut membuka kunci jawaban tersebut. Bertha langsung datang kemeja siswa dan langsung mengambil secarik kertas yang ternyata benar kunci jawaban bahasa inggris.

19. Laporan: Rosida Febrianti Simajuntak SPd. (32 Tahun). Guru SMA Negeri I Dolok Sanggul dan mengawas di SMA Negeri I Pollung.

Menyakan hal-hal yang terjadi dalam pelaksanaan UN di daerah tersebut sebagai berikut :

1. Siswa SMA (Peserta UN) dibantu ketika ujian berlangsung dengan diberikan kunci jawaban oleh panitia UN disekolah yang bersangkutan sebanyak 50 % dari jumlah soal yang diujikan, dan kunci jawaban dibagi melalui pengawas atau diberikan langsung oleh panitia bila pengawas yang bertugas tersebut tidak setuju akan hal itu
2. Dari butir nomor satu dilakukan hampir di seluruh sekolah-sekolah (negeri dan swasta yang ada di kabupaten Humbang hasundutan. Hal ini diketahui Rosida setelah melakukan kumunikasi seputar UN dengan teman-teman dari

hal ini dapat disimpulkan berarti ada instruksi dari atas untuk membantu siswa di daerah HUMBahas.



IAIN PALOPO

RIWAYAT HIDUP



- Nama Lengkap : Talmiadi Ahmad
- Tempat, Tanggal Lahir : Dasan Re, 05 Januari 1975
- Alamat : BTN Hartaco Jl. Binturu Jaya No. 85 Kota Palopo
- Pekerjaan : PNS (Guru) di SMAN 01 Bua Kab. Luwu
- Orang Tua : 1. Muhammad (Alm.)
2. Nursahnim
- Isteri : Dewi Wahyuni, S. Ip.
- Anak : 1. Ahmad Rifqi Ridwanullah T.
2. Ahmad Dzulfahmi Fadhlullah T.
3. Afifah Nurul 'Izzah Talmiadi
4. Afiqah Nurfadhilah Talmiadi
- Motto : "Hidup Mulia dengan Iman dan Pengorbanan"
- Riwayat Pendidikan : 1. SDN 1 Kalijaga Timur, NTB tahun 1988
2. SMPN 1 Aikmel - Lombok Timur, NTB tahun 1991
3. MAN 1 Selong, NTB tahun 1994
4. S1 STAIN Palopo, tahun 2002
5. S2 STAIN Palopo, tahun 2014
- Riwayat Organisasi : 1. Ketua Umum HMI-MPO Cab. Palopo tahun 2000
2. Pengurus PGRI Cabang Bua Kab. Luwu tahun 2010-2014
3. Ketua Umum Yayasan Nurul Islam Palopo, tahun 2005-2015